BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

TEKNIS INDIKATOR INOVASI DAERAH PADA SOSIALISASI LOMBA INOVASI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2026

Sragen, 14 September 2026

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

INOVASI DAERAH



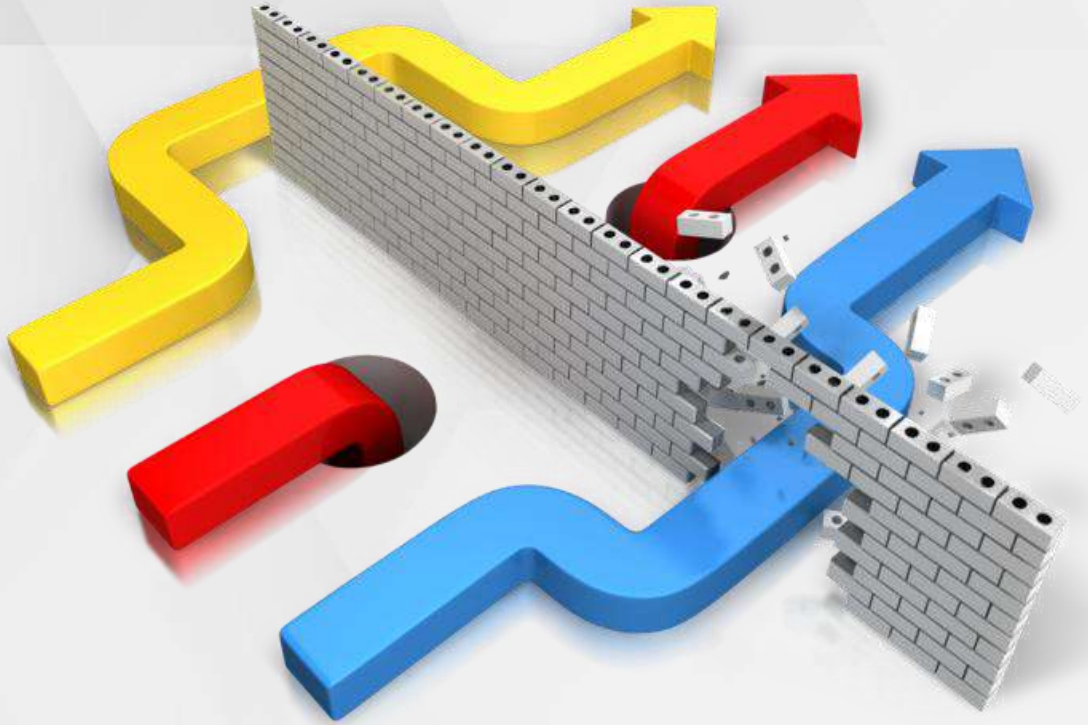
INOVASI DAERAH

Penilaian:

SUBSTANSI
DAN
ADMINISTRASI

Proposal Inovasi
+
20 Indikator (Data Dukung)

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN



HASIL INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

PETA KEKUATAN INOVASI KAB. SRAGEN TAHUN 2021-2025

RANKING KAB. SRAGEN 2021-2025:

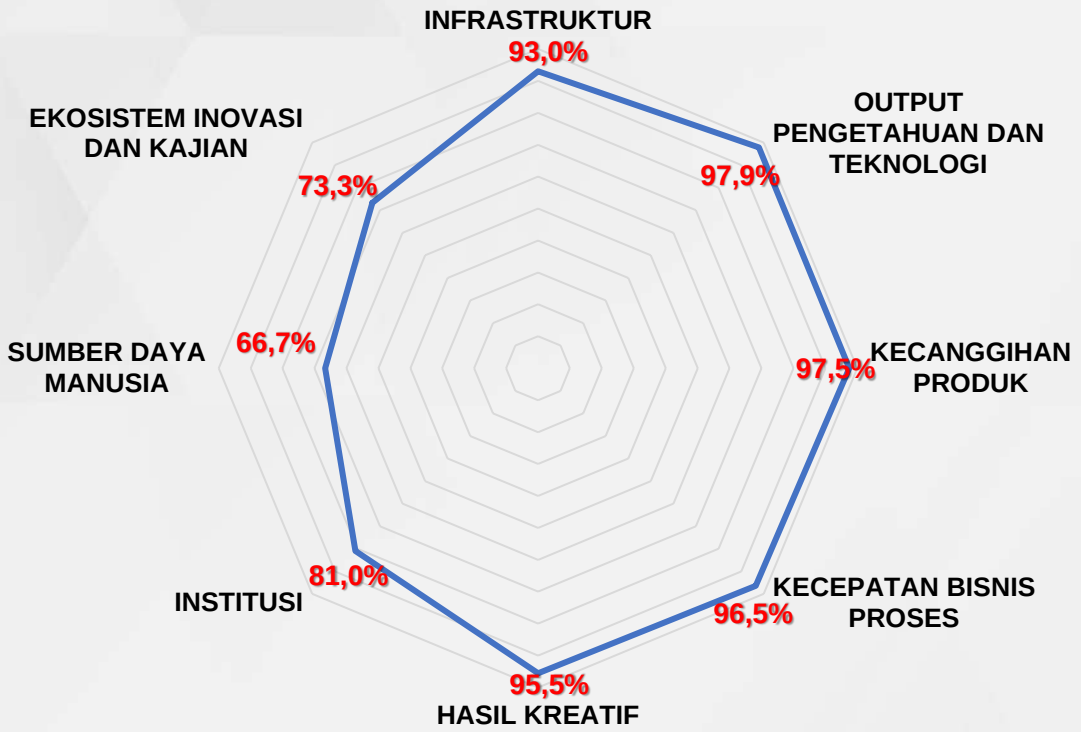
33/415 KABUPATEN TAHUN 2021
7/415 KABUPATEN TAHUN 2022
5/415 KABUPATEN TAHUN 2023
3/415 KABUPATEN TAHUN 2024
12/415 KABUPATEN TAHUN 2025

PREDIKAT:

INOVATIF (2021)
SANGAT INOVATIF (2022)
SANGAT INOVATIF (2023)
SANGAT INOVATIF (2024)
SANGAT INOVATIF (2025)

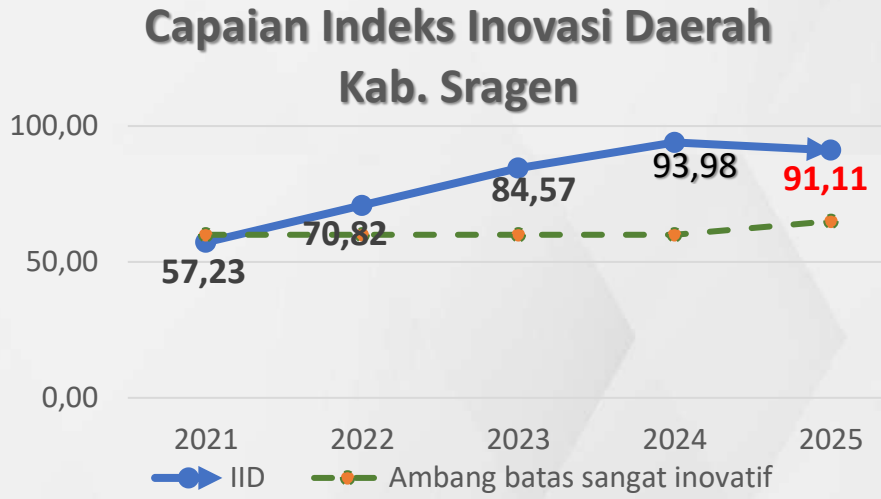
JUMLAH INOVASI YANG DI INPUT 2025

224 INOVASI
224 INOVASI PENERAPAN
0 INOVASI UJI COBA
0 INOVASI INISIATIF



JUMLAH INOVASI YANG DIKIRIM & SCORE HASIL VALIDASI TAHUN 2025:

219 INOVASI DIKIRIM
91,11 SCORE

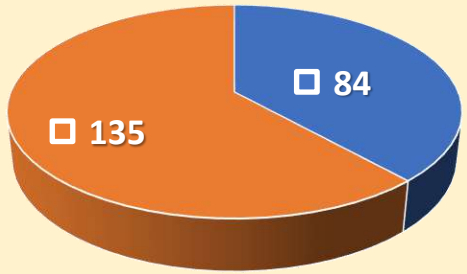


LAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH (IID) KAB SRAGEN MENGALAMI TREND YANG POSITIF DALAM KURUN WAKTU 4 TAHUN PELAPORAN, NAMUN MENURUN DI TAHUN TERAKHIR. HAL INI DIPENGARUHI ADANYA BEBERAPA INOVASI DENGAN PENJELASAN PROFIL INOVASI YANG TERLALU SUMIR SEHINGGA MENYEBABKAN SKOR KUANTITAS INOVASI DAERAH BELUM MAKSIMAL SERTA MASIH RENDAHNYA VARIABEL SUMBERDAYA MANUSIA

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

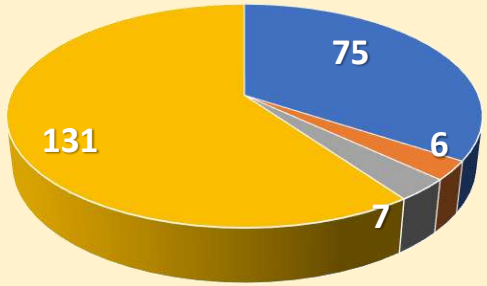
SEBARAN 219 INOVASI YANG DIKIRIM OLEH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

JUMLAH INOVASI BERDASARKAN TAHUN PENERAPAN



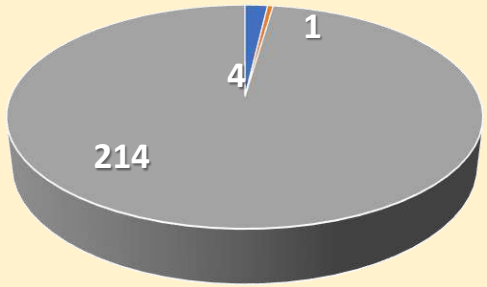
2023 2024

JUMLAH INOVASI BERDASARKAN INISIATOR



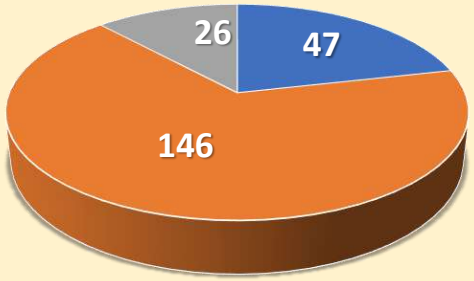
ASN Kepala Daerah Masyarakat OPD

JUMLAH INOVASI BERDASARKAN KLASIFIKASI INOVASI



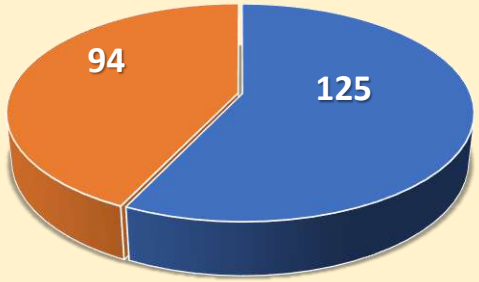
Inovasi Desa dan Kelurahan
Inovasi Masyarakat
Inovasi Perangkat Daerah

JUMLAH INOVASI BERDASARKAN BENTUK



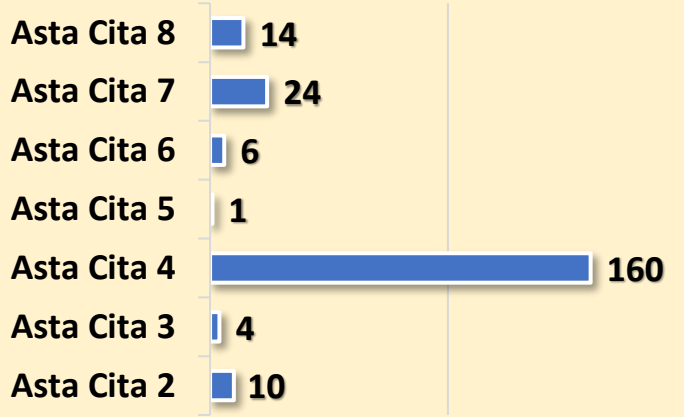
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

JUMLAH INOVASI BERDASARKAN JENIS



Digital Non Digital

JUMLAH INOVASI BERDASARKAN ASTA CITA



BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

LIST 27 INOVASI YANG DITOLAK (REJECTED)
HASIL VERIFIKASI DAN QUALITY CONTROL IID 2025

No	Nama Inovasi	Alasan Verifikator	Alasan Quality Control
1	BerPUSAT (Berbagai Program Unggul SDN Gondang 1)	Program BerPUSAT lebih banyak memuat kegiatan rutin yang sudah umum ada di sekolah, sehingga aspek inovasi, keberbedaan, indikator capaian, dan bukti keberhasilan belum tergambar jelas.	Program BerPUSAT lebih banyak berisi kegiatan rutin yang lazim dilakukan di sekolah, sehingga tidak menunjukkan aspek kebaruan atau keberbedaan yang menjadi ciri inovasi. Selain itu, indikator capaian dan bukti keberhasilan belum dijelaskan secara jelas, sehingga sulit menilai efektivitas dan dampak program sebagai inovasi daerah.
2	Pemanfaatan Youtube sebagai Media Inovasi Digital dalam Upaya Peningkatan Kualitas dan Promosi Sekolah	rancang bangun tidak mencerminkan inovasi itu sendiri hanya copy pengertian pengertian yang ada tidak menjelaskan rancang bangun inovasi itu sama sekali, ketika pengertian undang undang dihilangkan kata katanya tersisa dibawah 300	Rancang bangun tidak mencerminkan substansi inovasi yang diusulkan. Isi dokumen hanya menyalin pengertian dari peraturan perundang-undangan tanpa menjelaskan ide, proses, maupun mekanisme inovasinya.
3	running text sebagai inovasi pendukung kegiatan belajar mengajar	rancang bangun tidak sesuai dan di bawah 300 kata	Jumlah minimal kata tidak terpenuhi, sehingga rancang bangun tidak memberikan gambaran yang cukup terhadap gagasan inovasi.
4	Penciptaan Karya Seni Lagu Mars SMP Negeri 1 Plupuh	Naskah inovasi ini lebih banyak menjelaskan visi, misi, tujuan, dan manfaat secara umum, tetapi tidak menampilkan proses, kebaruan, dan gambaran nyata penciptaan lagu mars sebagai sebuah inovasi. Akibatnya, inovasi tidak tergambar jelas dan tidak memenuhi bobot rencana bangun inovasi yang diharapkan.	Naskah inovasi lebih menekankan pada visi, misi, tujuan, dan manfaat secara umum tanpa menjelaskan proses, unsur kebaruan, maupun tahapan penciptaan lagu mars sebagai bentuk inovasi. Akibatnya, inovasi tidak tergambar secara jelas dan belum memenuhi kriteria substansi rancang bangun inovasi yang diharapkan.
5	ASOI (Absensi Online)	inovasi ASOI (Absensi Online) masih kurang memenuhi unsur kebaruan karena sistem absensi digital serupa telah banyak digunakan secara luas di berbagai instansi. Selain itu, deskripsi inovasi belum menunjukkan perbedaan signifikan atau keunggulan khas dibanding aplikasi absensi online lain, serta belum disertai indikator keberhasilan yang terukur dan analisis potensi hambatan dalam implementasi	Inovasi belum memenuhi unsur kebaruan karena sistem absensi digital serupa telah banyak digunakan di berbagai instansi. Deskripsi inovasi juga belum menunjukkan perbedaan signifikan atau keunggulan khas dibanding aplikasi absensi lainnya, serta belum disertai indikator keberhasilan yang terukur maupun analisis potensi hambatan implementasi.
6	DoA PuJi (Dongeng Anak Puro siJi)	Program DoA PuJi (Dongeng Anak Puro siJi) dinilai belum memiliki kebaharuan yang signifikan karena konsep literasi berbasis dongeng maupun flip book digital sudah banyak dikembangkan sebelumnya dalam berbagai program literasi	Program belum menunjukkan kebaruan yang signifikan karena konsep literasi berbasis dongeng dan flip book digital telah banyak diterapkan dalam program literasi sekolah lainnya. Fokus peningkatan minat baca juga tidak memiliki perbedaan yang jelas dengan inovasi sejenis,

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

LIST 27 INOVASI YANG DITOLAK (REJECTED)
HASIL VERIFIKASI DAN QUALITY CONTROL IID 2025

No	Nama Inovasi	Alasan Verifikator	Alasan Quality Control
7	Kalijambe Call Center	Sebaiknya pemerintah kecamatan lebih fokus memperkuat kanal pengaduan yang sudah ada agar lebih terintegrasi dan efektif, bukan membentuk layanan baru yang berpotensi menambah beban administrasi.	Pemerintah kecamatan lebih baik fokus memperkuat dan mengoptimalkan kanal pengaduan yang sudah ada agar lebih terintegrasi dan efektif, daripada membentuk layanan baru yang berpotensi menambah beban administrasi tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap pelayanan publik.
8	LADIESONE (Laboratorium Digital SD Negeri Sragen 1)	kurang kebaruan, tidak sesuai langsung dengan permasalahan literasi, serta belum realistis untuk diterapkan di sekolah dasar dengan keterbatasan fasilitas.	Inovasi dinilai kurang memiliki kebaruan, belum secara langsung menjawab permasalahan literasi yang ada, serta belum realistis diterapkan di lingkungan sekolah dasar yang memiliki keterbatasan fasilitas.
9	LAKONE TENAR	nama inovasi yang digunakan kurang dijelaskan secara mendalam dan bahasa yg digunakan kurang jelas	Nama inovasi tidak dijelaskan secara mendalam sehingga makna dan keterkaitannya dengan substansi inovasi kurang tergambar. Selain itu, penggunaan bahasa dalam naskah masih kurang jelas dan tidak komunikatif, sehingga pesan dan konsep inovasi sulit dipahami secara utuh.
10	LATU KUMANDANG Versi 2 (Layanan Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara secara Terintegrasi di Kabupaten Sragen)	rancangan bangun lebih berat ke penjelasan dasar hukum & justifikasi regulasi, bukan ke detail desain inovasi.	Rancang bangun lebih menekankan pada penjelasan dasar hukum dan justifikasi regulasi, bukan pada uraian detail mengenai desain, mekanisme, atau implementasi inovasi. Akibatnya, substansi inovasi tidak tergambar secara jelas dan belum memenuhi kriteria rancang bangun inovasi yang diharapkan.
11	MAMI MIKE (Mantau Menu Ibu Hamil KEK)	Inovasi “MAMI MIKE (Mantau Menu Ibu Hamil KEK)” dinilai belum memenuhi kriteria kebaruan. Substansi kegiatan yang diajukan pada dasarnya sudah termasuk dalam program nasional Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil KEK serta intervensi gizi rutin yang dilaksanakan melalui Posyandu dan Puskesmas, meliputi pemanfaatan pangan lokal, edukasi gizi, pencatatan menu, dan pemantauan konsumsi protein hewani. Dengan demikian, inovasi ini lebih merupakan penguatan atau rebranding dari program yang sudah berjalan, bukan terobosan baru. Selain itu, terdapat potensi duplikasi pencatatan dan pelaporan yang justru menambah beban kader, sehingga efektivitas program dapat	Inovasi belum memenuhi kriteria kebaruan karena substansi kegiatannya sejalan dengan program nasional PMT Ibu Hamil KEK dan intervensi gizi rutin di Posyandu maupun Puskesmas. Kegiatan seperti pemanfaatan pangan lokal, edukasi gizi, pencatatan menu, dan pemantauan protein hewani sudah menjadi praktik umum. Inovasi ini lebih merupakan bentuk penguatan atau rebranding dari program yang ada, bukan terobosan baru. Selain itu, terdapat potensi duplikasi pencatatan dan pelaporan yang dapat menambah beban kader serta menurunkan efektivitas pelaksanaan program.

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

LIST 27 INOVASI YANG DITOLAK (REJECTED)
HASIL VERIFIKASI DAN QUALITY CONTROL IID 2025

No	Nama Inovasi	Alasan Verifikator	Alasan Quality Control
12	Monita VidEdu (Monitoring Kepala Sekolah memanfaatkan Google Workspace for Education)	rancang bangun tidak mencerminkan inovasi itu sendiri hanya copy pengertian pengertian yang ada tidak menjelaskan rancang bangun inovasi itu sama sekali	Rancang bangun tidak mencerminkan substansi inovasi karena hanya menyalin pengertian umum tanpa menjelaskan ide, proses, atau mekanisme inovasi yang diusulkan. Dokumen tidak menunjukkan kebaruan maupun rancangan nyata pelaksanaan inovasi, sehingga tidak memenuhi kriteria rancang bangun inovasi yang diharapkan.
13	NYEDAK TAS KULO	Bahasa inovasi sedikit ambigu, lebih dijelaskan kepanjangannya seperti apa dan agar mudah dipahami	Bahasa yang digunakan dalam penamaan inovasi masih ambigu dan belum dijelaskan kepanjangannya, sehingga makna dan tujuan inovasi sulit dipahami. Perlu penjabaran yang lebih jelas agar nama inovasi mencerminkan substansi dan mudah dimengerti.
14	Pemanfaatan _pocket book_ terkoneksi flip book dalam peningkatan penguasaan bahasa inggris usia sekolah dasar	Inovasi Rancang Bangun Pocket Book Bahasa Inggris belum layak disetujui karena konten dan spesifikasi masih terlalu umum, aspek kebaruan terbatas pada bentuk media, serta rencana pengembangan digital belum jelas dan terukur. Selain itu, tidak disertai metode implementasi maupun evaluasi yang konkret untuk mengukur efektivitas penggunaannya	Inovasi belum layak disetujui karena konten dan spesifikasinya masih terlalu umum, dengan kebaruan yang terbatas pada bentuk media. Rencana pengembangan digital belum dijelaskan secara jelas dan terukur, serta belum disertai metode implementasi dan evaluasi yang konkret untuk menilai efektivitas penggunaannya.
15	PERUT BUNDER (PENDAMPINGAN RUTIN IBU HAMIL RESTI OLEH KADER)	Program PERUT BUNDER belum dapat disetujui sebagai inovasi karena angka ibu hamil risiko tinggi (33,33%) tidak menunjukkan urgensi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain, serta konsep pendampingan oleh kader sudah menjadi bagian dari program nasional (P4K, K4). Inovasi ini lebih bersifat penguatan program yang ada, belum menunjukkan kebaruan yang signifikan.	Program belum dapat disetujui sebagai inovasi karena angka ibu hamil risiko tinggi (33,33%) tidak menunjukkan urgensi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain. Selain itu, konsep pendampingan oleh kader sudah menjadi bagian dari program nasional seperti P4K dan K4. Program ini lebih merupakan penguatan dari kegiatan yang sudah ada dan belum menunjukkan kebaruan yang signifikan.
16	Program Keluarga Bahagia	Usulan program ini belum dapat ditetapkan sebagai inovasi karena substansinya masih berupa penguatan sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat yang sudah menjadi amanat regulasi dan praktik umum di berbagai lembaga pendidikan. Program belum menunjukkan kebaruan metode maupun terobosan yang signifikan untuk dikategorikan sebagai inovasi	Usulan program ini belum dapat ditetapkan sebagai inovasi karena substansinya masih berupa penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang sudah menjadi amanat regulasi serta praktik umum di lembaga pendidikan. Program belum menunjukkan kebaruan metode atau terobosan signifikan yang dapat dikategorikan sebagai inovasi.

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

LIST 27 INOVASI YANG DITOLAK (REJECTED)
HASIL VERIFIKASI DAN QUALITY CONTROL IID 2025

No	Nama Inovasi	Alasan Verifikator	Alasan Quality Control
17	Religion Learning Platform (Aplikasi Pembelajaran Agama Berbasis Website dan Android)	rancang bangun tidak mencerminkan inovasi itu sendiri hanya copy pengertian pengertian yang ada tidak menjelaskan rancang bangun inovasi itu sama sekali, ketika pengertian undang undang dihilangkan kata katanya tersisa dibawah 300	Rancang bangun tidak mencerminkan substansi inovasi karena hanya memuat salinan pengertian dari peraturan tanpa penjelasan mengenai ide, proses, maupun mekanisme inovasi. Setelah bagian pengertian dihapus, isi yang tersisa kurang dari 300 kata dan tidak menggambarkan rancang bangun inovasi secara nyata.
18	SAYANG GADIS MANIS (Sayangi Keluarga Anda dengan menjadi pengawas minum obat pasien kronis)	rancang bangun tidak mencerminkan inovasi itu sendiri hanya copy pengertian pengertian yang ada tidak menjelaskan rancang bangun inovasi itu sama sekali, ketika pengertian undang undang dihilangkan kata katanya tersisa dibawah 300	Rancang bangun tidak mencerminkan substansi inovasi karena hanya berisi salinan pengertian dari peraturan tanpa penjelasan mengenai ide, proses, atau mekanisme inovasi yang diusulkan. Setelah bagian pengertian dihapus, isi yang tersisa kurang dari 300 kata dan tidak menggambarkan rancang bangun inovasi secara nyata.
19	SETU SANGAJI	Program Setu Sangaji memiliki niat baik dalam pelestarian Bahasa Jawa Krama, namun konsepnya belum dapat dikategorikan sebagai inovasi baru karena sudah menjadi bagian dari program muatan lokal di sekolah-sekolah Jawa Tengah. Kegiatan ini lebih bersifat pembiasaan rutin dan penguatan budaya sekolah, sehingga belum menunjukkan unsur kebaruan maupun dampak yang lebih luas	Program memiliki tujuan baik dalam pelestarian Bahasa Jawa Krama, namun belum dapat dikategorikan sebagai inovasi baru karena kegiatan serupa sudah menjadi bagian dari program muatan lokal di sekolah-sekolah Jawa Tengah. Program ini lebih bersifat pembiasaan rutin dan penguatan budaya sekolah, sehingga belum menunjukkan unsur kebaruan maupun dampak yang lebih luas.
20	SISTEM AUTOMATISASI PELAPORAN PELANGGARAN SISWA (SAPARI) SMP NEGERI 3 SATU ATAP SAMBIREJO	SAPARI belum memiliki kebaruan signifikan karena fungsi pelaporan pelanggaran siswa berbasis digital sudah umum digunakan. Selain itu, inovasi ini masih bersifat lokal sekolah dan belum terintegrasi dengan sistem resmi pendidikan, sehingga dampak dan keberlanjutannya belum kua	Inovasi ini belum menunjukkan kebaruan yang signifikan karena fungsi pelaporan pelanggaran siswa berbasis digital telah banyak digunakan sebelumnya. Selain itu, inovasi masih bersifat lokal di tingkat sekolah dan belum terintegrasi dengan sistem resmi pendidikan, sehingga dampak serta keberlanjutannya belum kuat.
21	SISTEM INFORMASI PELAPORAN PENYAKIT MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN (SIAP MAS SUKOWATI)	novasi Siap Mas Sukowati belum dapat diterima karena masih sebatas pemanfaatan Google Spreadsheet yang bukan platform resmi pemerintah, sehingga kurang memiliki unsur kebaruan, tidak menjamin keamanan data, serta belum terintegrasi dengan sistem layanan publik yang ada.	Inovasi belum dapat diterima karena hanya memanfaatkan Google Spreadsheet yang bukan platform resmi pemerintah. Penggunaan ini kurang mencerminkan unsur kebaruan, tidak menjamin keamanan data, serta belum terintegrasi dengan sistem layanan publik yang ada, sehingga tidak memenuhi kriteria inovasi pelayanan publik.
22	SUKMA (Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sragen)	Usulan inovasi SUKMA belum dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah karena substansi kegiatannya masih serupa dengan kewajiban survei kepuasan masyarakat yang sudah	Inovasi SUKMA belum dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah karena substansi kegiatannya serupa dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang sudah menjadi kewajiban instansi pemerintah.

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

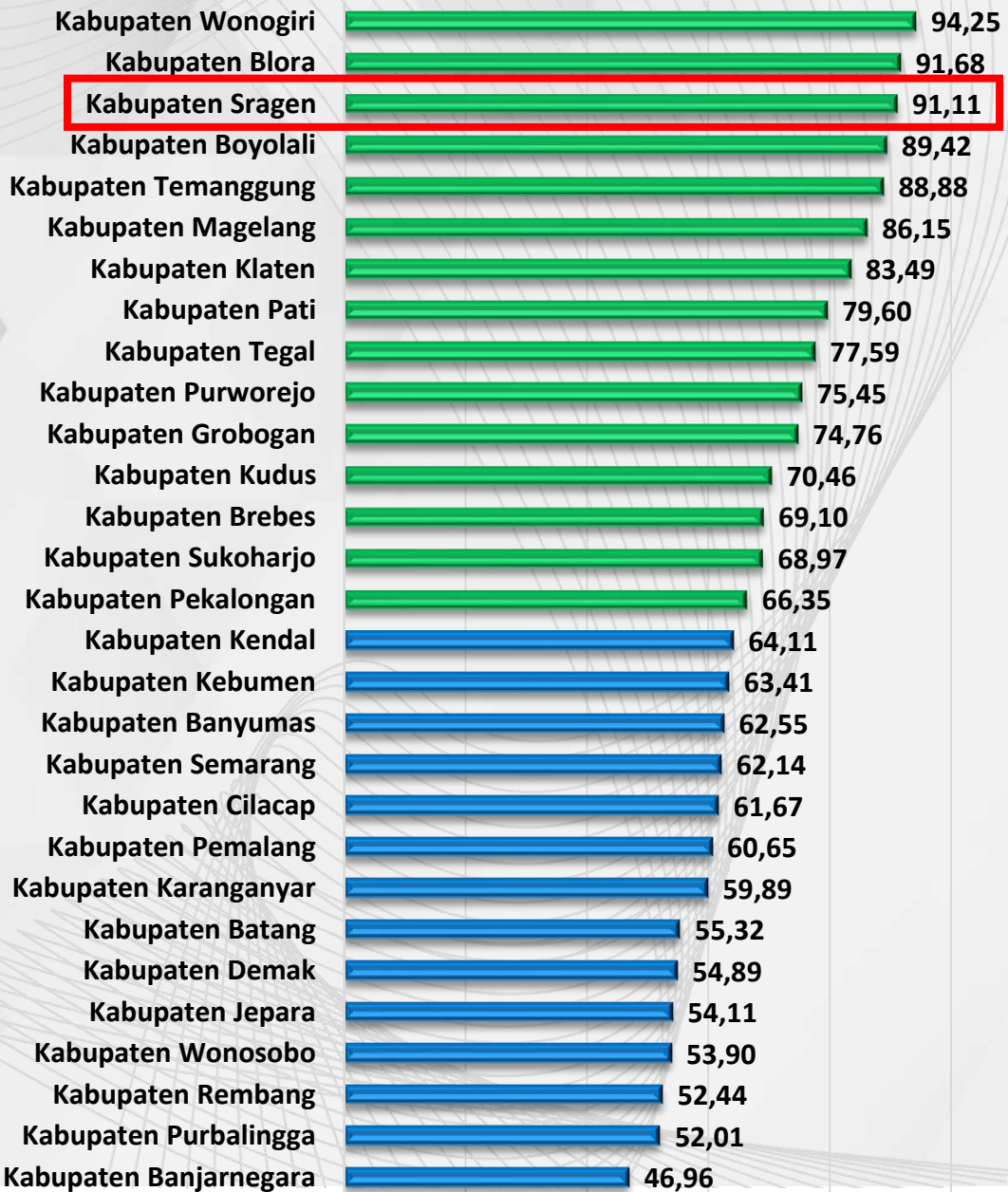
LIST 27 INOVASI YANG DITOLAK (REJECTED)
HASIL VERIFIKASI DAN QUALITY CONTROL IID 2025

No	Nama Inovasi	Alasan Verifikator	Alasan Quality Control
23	SUTRA ENAK (SURAT KETERANGAN DISPENSASI NIKAH)	novasi SUTRA ENAK belum dapat diterima karena masih terbatas pada pemanfaatan Google Form yang bukan platform resmi pemerintah, belum memiliki unsur kebaruan, serta belum menjamin keamanan data dan keberlanjutan layanan	Inovasi belum dapat diterima karena masih terbatas pada penggunaan Google Form yang bukan platform resmi pemerintah. Inovasi ini belum menunjukkan unsur kebaruan, serta belum menjamin keamanan data dan keberlanjutan layanan, sehingga tidak memenuhi kriteria inovasi pelayanan publik.
24	WEKAS PEGAS (Web Aplikasi Pengumpulan Tugas)	Usulan inovasi WEKAS PEGAS belum dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah karena fitur dan konsep yang ditawarkan belum menunjukkan kebaruan yang signifikan. Sistem pengumpulan dan pemantauan tugas siswa secara digital telah banyak tersedia melalui platform yang umum digunakan (seperti Google Classroom atau Google Drive), sehingga WEKAS PEGAS lebih tepat dikategorikan sebagai adopsi teknologi yang sudah ada, bukan sebagai inovasi baru.	Inovasi belum dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah karena fitur dan konsepnya belum menunjukkan kebaruan yang signifikan. Sistem pengumpulan dan pemantauan tugas siswa secara digital sudah umum tersedia melalui berbagai platform seperti Google Classroom atau Google Drive, sehingga lebih merupakan adopsi teknologi yang sudah ada, bukan inovasi baru.
25	PEMBAJA (Pembiasaan Kamis Berbahasa Jawa)	Program Pembaja (Pembiasaan Kamis Berbahasa Jawa) lebih bersifat rutinitas sekolah untuk pelestarian budaya, belum menunjukkan unsur kebaruan atau inovasi yang signifikan sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai inovasi pelayanan publik.	Program ini lebih bersifat kegiatan rutin sekolah dalam rangka pelestarian budaya, belum menunjukkan unsur kebaruan, keunikan, maupun perubahan signifikan dalam pelayanan publik. Dengan demikian, program ini belum memenuhi kriteria sebagai inovasi pelayanan publik.
26	Tampah Jadul Kedawung (Tabung Sampah Jadi Duit)	Usulan inovasi Tampah Jadul Kedawung (Tabung Sampah Jadi Duit) belum dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah karena konsep bank sampah dengan sistem tabungan telah banyak diterapkan di berbagai daerah sehingga tidak menunjukkan kebaruan yang signifikan. Program ini lebih tepat dikategorikan sebagai replikasi atau penguatan program pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai bentuk inovasi baru.	Inovasi belum dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah karena konsep bank sampah dengan sistem tabungan sudah banyak diterapkan di berbagai daerah, sehingga tidak menunjukkan kebaruan yang signifikan. Program ini lebih merupakan replikasi atau penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat, bukan inovasi baru.
27	Manajemen ADministrasi dan Alokasi ANGgaran ke DESa (MADAANG DES)	inovasi ini masih terlalu bersifat teoritis dan cenderung merupakan penjabaran regulasi yang sudah ada, tanpa menunjukkan kebaruan nyata ataupun penerapan langsung di lapangan. Uraian lebih banyak menyalin ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga inovasi belum menampilkan	Inovasi ini masih bersifat teoritis dan cenderung merupakan penjabaran regulasi yang sudah ada, tanpa menunjukkan kebaruan nyata atau penerapan di lapangan. Uraian lebih banyak menyalin ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga belum menampilkan keaslian gagasan, keterlibatan masyarakat, maupun bukti praktik yang

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

REKAPITULASI *SCORE* INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH 2025

KLASTER KABUPATEN

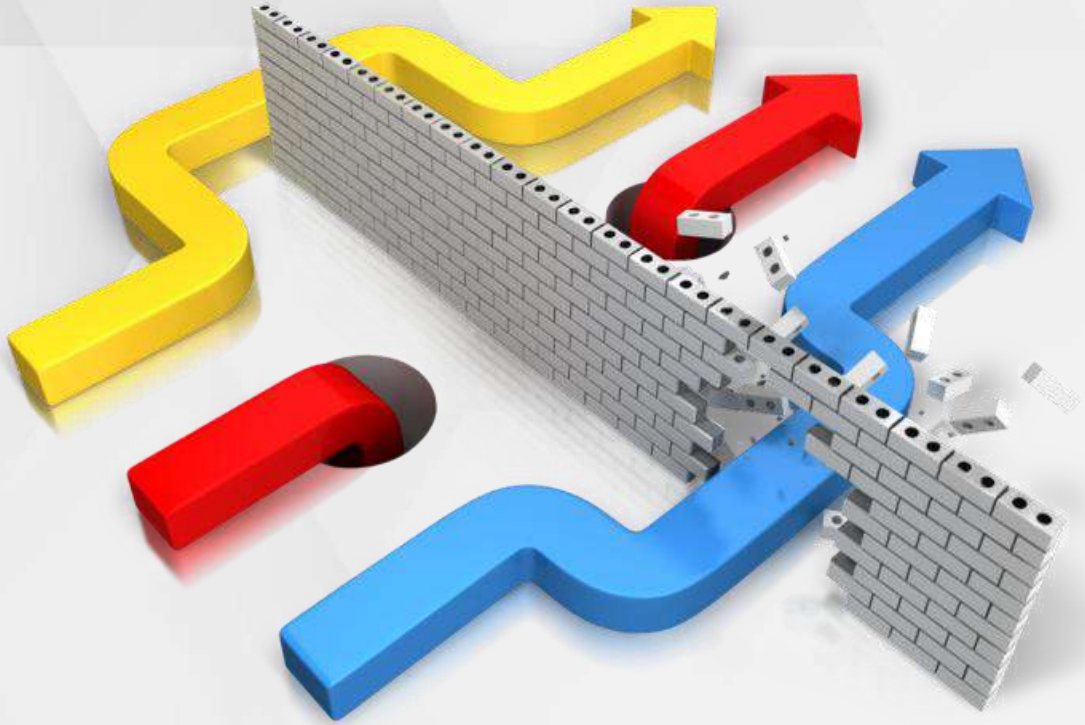


KLASTER KOTA



KATEGORI	SKOR
SANGAT INOVATIF	65,01-100,00
INOVATIF	40,01-60,00
KURANG INOVATIF	0,01-40,00
TIDAK DAPAT DINILAI	0

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN



STRATEGI PENGUATAN INOVASI KABUPATEN SRAGEN

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

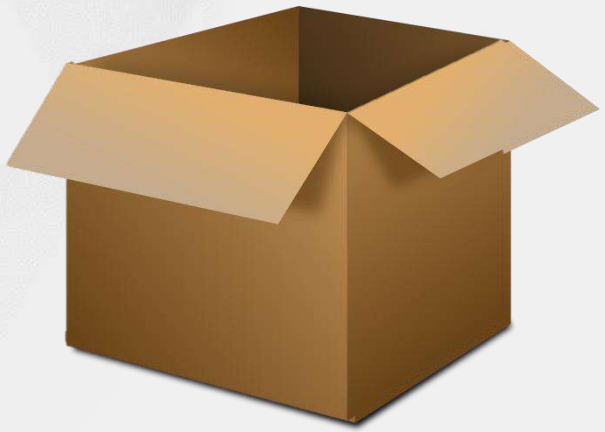
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PRAKTEK PELAYANAN PUBLIK



- *Prosedur Dan Mekanisme Kerja Pelayanan yang Berbelit-belit*
- *Tidak Transparan*
- *Kurang Informatif*
- *Kurang Akomodatif*
- *Kurang Konsisten*
- *Fasilitas Sarana Prasarana Pelayanan Terbatas*
- *Tidak Ramah Lingkungan*
- *Tidak Ada Jaminan Kepastian Dari Segi Hukum, Waktu Dan Biaya*
- *Pungli*
- *Praktek KKN*

TUNTUTAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK

PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK



- **FASTER (LEBIH CEPAT)** — *Minimize bureaucratic path*
- **SMARTER (LEBIH PINTAR)** — *Minimize manual services*
- **CHEAPER (LEBIH MURAH)** — *Minimize cost of the money*
- **EASIER (LEBIH MUDAH)** — *Minimize requirements*
- **BETTER (LEBIH BAIK)** — *Minimize old methods*

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

APA ITU INOVASI?

PENGERTIAN INOVASI

Inovasi Adalah **Cara/Alat/Media** yang digunakan oleh unit kerja semata-mata untuk **Mencapai Tujuan** yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan target sasaran.

CIRI-CIRI INOVASI

- Baru Dibuat Atau Pembaharuan/Diperbarui (Tidak Harus 100% Baru)
- Lebih mudah, murah, easy to use, transparan, akuntabel, efektif dan efisien
- Memecahkan Masalah
- Memberikan nilai tambah
- Kolaborasi dan leadership
- Diadopsi/direplikasi
- Meningkatkan Kualitas Hasil

BENTUK INOVASI

- Produk Baru
- Cara Kerja Baru
- Teknologi Baru
- Mekanisme Baru
- Sistem Baru
- 👉 *Intinya: Inovasi = Perubahan Yang Membuat Sesuatu Menjadi Lebih Baik.*

TRUST PUBLIC

TUJUAN AKHIR
INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK

- MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
- MENGURANGI BIROKRASI DAN HAMBATAN
- MENGHASILKAN NILAI PUBLIK
- MEMPERKUAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
- 👉 *KESIMPULAN: INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK = CARA BARU PEMERINTAHAN DALAM BEKERJA UNTUK MELAYANI RAKYAT LEBIH BAIK.*

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

INOVASI DAERAH

(BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 DAN PP 38 TAHUN 2017)

DEFINISI

Inovasi Daerah ➔ pembaharuan dalam ➔ penyelenggaraan pemerintahan daerah ➔ meningkatkan kinerja pemda

KRITERIA MENGANDUNG PEMBAHARUAN

1. MEMBERI MANFAAT BAGI DAERAH DAN/ATAU MASY
2. TIDAK MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN DAN/ATAU PEMBATASAN
3. MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH
4. DAPAT DIREPLIKASI.

PRINSIP-PRINSIP

1. EFISIENSI
2. EFEKTIVITAS
3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN
4. TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN
5. BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN UMUM
6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA
7. MEMENUHI NILAI KEPATUTAN
8. DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN

BENTUK

1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
2. PELAYANAN PUBLIK
3. INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

JENIS

1. DIGITAL
2. NON DIGITAL



INISIATOR

1. KEPALA DAERAH
2. ANGGOTA DPRD
3. PERANGKAT DAERAH
4. APARATUR SIPIL NEGARA
5. MASYARAKAT

PERLINDUNGAN HUKUM

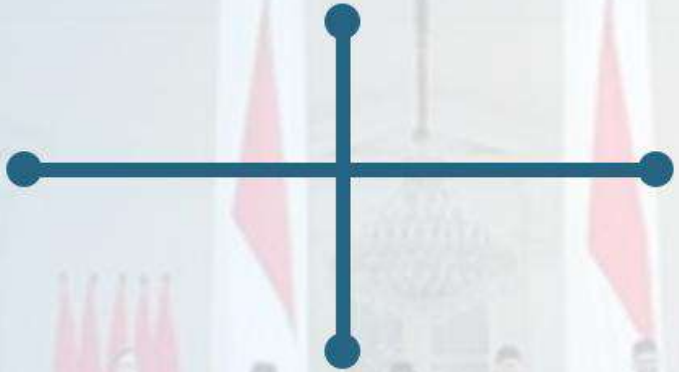
ASN TIDAK BISA DIPIDANA JIKA UJI COBA INOVASI DAERAH TIDAK MENCAPAI SASARAN SEPERTI YANG DITETAPKAN (PSL 389 UU 23 TH 2014)

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

MATRIK INOVASI

CHANGE

EGOISM



ALTRUISM

COMFORT ZONE

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

ALTRUISM



BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

INOVASI YANG BERBUDAYA/BERKELANJUTAN

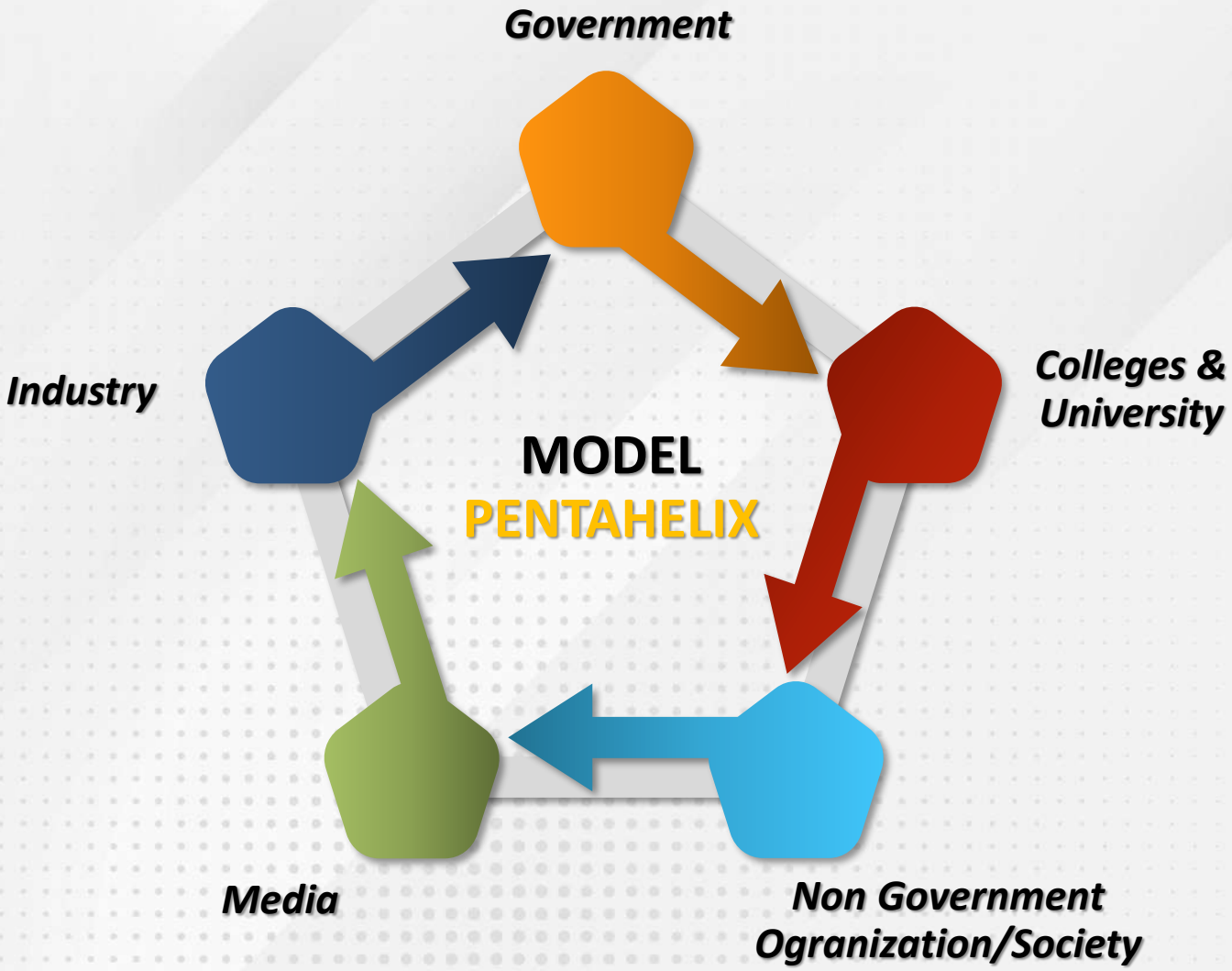
INOVASI BUTUH *COERCIEVE* POWER
INOVASI BUTUH TRANSFORMASI
KUNCI UTAMA INOVASI ADALAH LEADER !

REGULASI = KOMITMEN YANG MENDUKUNG INOVASI DAERAH

- **PERENCANAAN INOVASI**
- **PELAKSANAAN INOVASI**
- **EVALUASI INOVASI**
- **KEBERLANJUTAN INOVASI**



PENGEMBANGAN EKOSISTEM INOVASI MELALUI KERANGKA PENTAHELIX

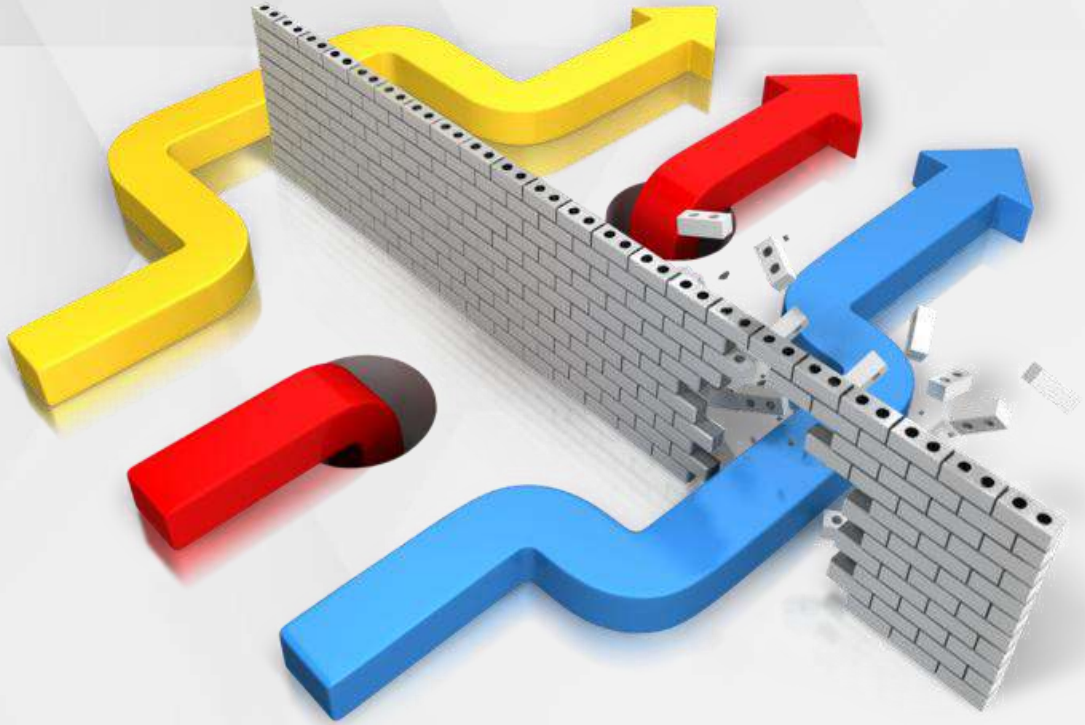


*Strategi pengembangan inovasi melalui kolaborasi pentahelix dilakukan dengan mengintegrasikan peran **lima aktor utama***

*pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas/masyarakat, dan media secara sinergis untuk menciptakan solusi yang adaptif, berbasis bukti, dan berkelanjutan. **Pemerintah** berperan sebagai orkestrator kebijakan dan pengarah kolaborasi, **akademisi** menyediakan dasar ilmiah serta hasil penelitian untuk mendukung pengambilan keputusan, **dunia usaha** menghadirkan teknologi dan investasi yang mempercepat implementasi inovasi, **komunitas** menjadi pengguna sekaligus co-creator yang memastikan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat, sementara **media** memperkuat transparansi, komunikasi publik, dan partisipasi masyarakat*

*Kolaborasi pentahelix memastikan inovasi pemerintahan **tidak berjalan secara sektoral**, tetapi sebagai upaya kolektif yang mendorong efisiensi, efektivitas, serta peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan*

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN



PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

PROFIL INOVASI DAERAH (ISIAN NARATIF)

Rancang Bangun

- Dasar Hukum Inovasi
- Permasalahan (Makro atau Mikro)
- Isu Strategis
- Metode Pembaharuan (Upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah)
- Keunggulan dan Kebaharuan
- Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk/Spesifikasi Produk
- Minimal kata: 300 kata

Tujuan

Mencangkup target capaian penyelenggaraan inovasi Daerah

Manfaat

Dampak (*Outcomes*) terhadap penerapan Inovasi Daerah

Hasil Inovasi

Produk/hasil (*Output*) penyelenggaraan Inovasi

PENGISIAN RANCANG BANGUN

Pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran umum bahwa suatu kegiatan yang telah diinisiasi, di ujicoba, maupun di implementasikan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai inovasi dengan menunjukan kebaharuan (*novelty*), keunikan, kekhususan, maupun prosedur yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

POINT TO POINT RANCANG BANGUN

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Permendagri/NSP K K/L dll
- Perda/Pergub/Perwali/Perbup
- SK/Instruksi KDH/ dll

2. PERMASALAHAN

- Permasalahan Makro
- Permasalahan Mikro

3. ISU STRATEGIS

- Isu global → misal sustainable development goals,
- Isu nasional → isu dlm RPJMN misal pengendalian inflasi, stunting, reformasi birokrasi
- Isu lokal → isu dlm RPJMD misal isu kontemporer yang sedang berkembang



6. TAHAPAN INOVASI/ PENGGUNAAN PRODUK

- Jelaskan secara singkat tata cara penggunaan aplikasi
- Atau uraikan tata laksana penciptaan atau pemanfaatan produk

5. KEUNGGULAN DAN KEBAHARUAN

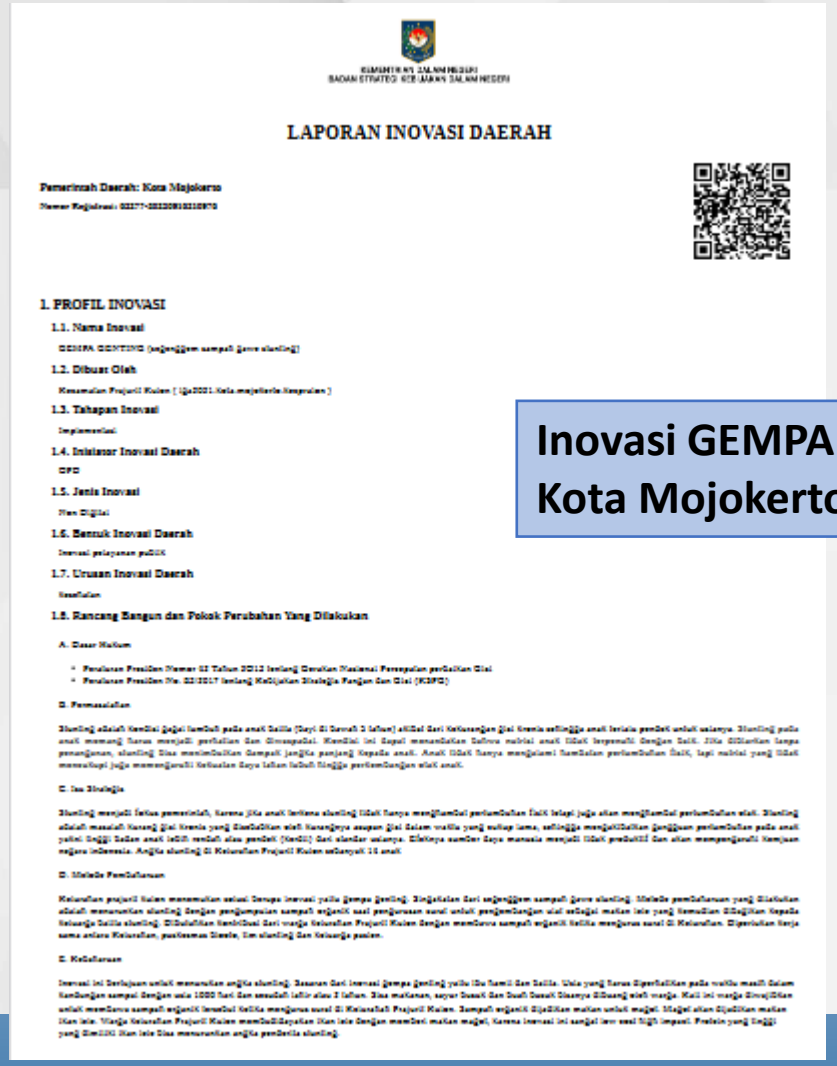
- Uraikan kebaharuan rancangbangunnya
- Sebutkan kapan dan apa pengembangannya apabila berupa update dan upgrade

4. METODE PEMBAHARUAN

- Kondisi sebelum (kondisi eksisting) dan sesudah inovasi (kondisi yang diharapkan)
- Melalui pendekatan/metode Invensi, Pengembangan, replikasi, dan sanggahan (refutation),

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

CONTOH PROPOSAL INOVASI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kota Mojokerto

Nomor Registrasi: 03277-20220913210970

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

GEMPA GENTING (sejenggem sampah jawa stunting)

1.2. Dibuat Oleh

Kecamatan Prajurit Kulon (ig2021.kota.mojokerto.kecprakul)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Kesehatan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

A. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi
- Peraturan Presiden No. 83/2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG)

B. Permasalahan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting pada anak memang harus menjadi perhatian dan diwaspadai. Kondisi ini dapat menyebabkan defisit nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik. Jika dibiarkan lama pertumbuhan, stunting bisa menimbulkan dampak jangka panjang kepada anak. Anak tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi nutrisi yang tidak memadai juga memengaruhi kebuatan saya lebih lebih tinggi perkembangan otak anak.

C. Isu Strategis

Stunting menjadi fokus pemerintah, karena jika anak terkena stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik tetapi juga akan mengganggu pertumbuhan otak. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Efeknya sumber daya manusia menjadi tidak produktif dan akan mempengaruhi kemjuan negara indonesia. Angka stunting di Kelurahan Prajurit Kulon sebanyak 15 anak.

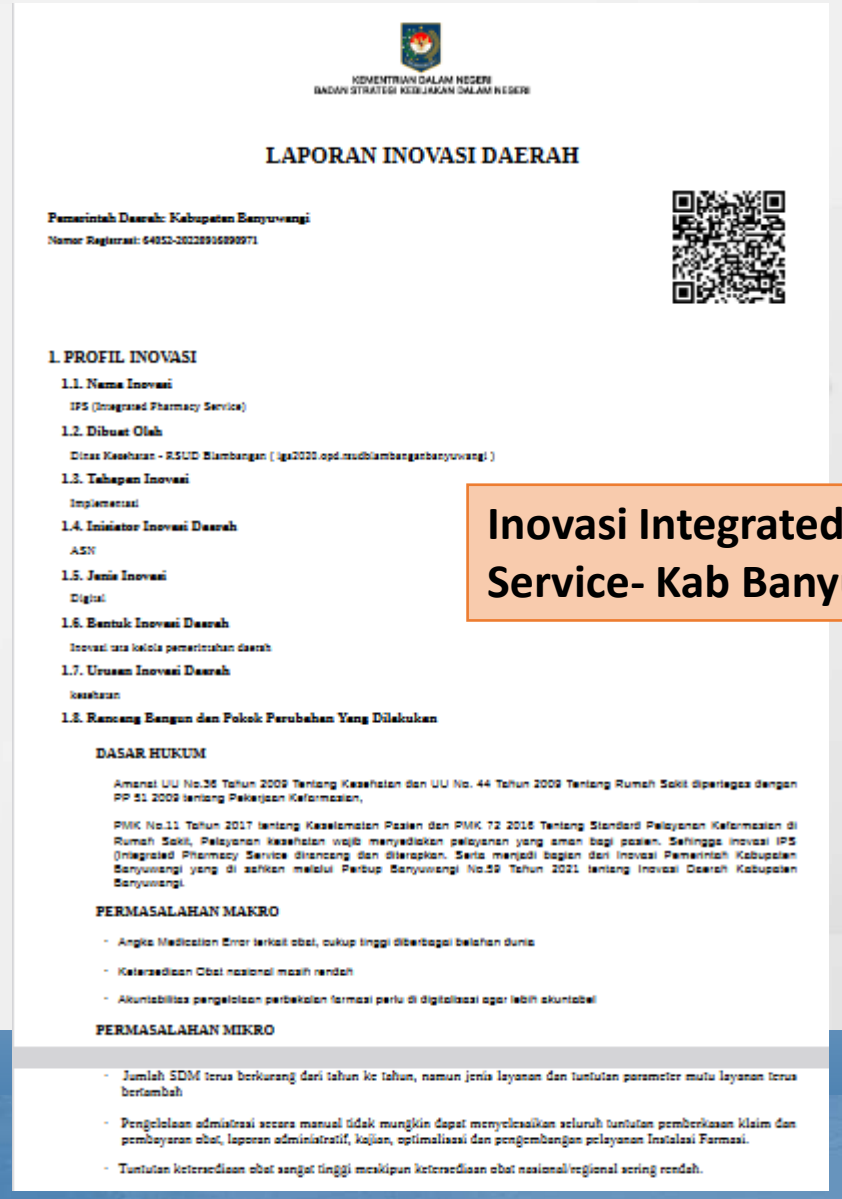
D. Metode Pemecahan

Kelurahan prajurit kulon menemukan solusi berupa inovasi yaitu gempa genting. Singkatan dari sejenggem sampah jawa stunting. Metode pemecahan yang dilakukan adalah menurunkan stunting dengan pengumpulan sampah sejenis nasi penggunaan surat untuk penggembangan alat sebagai makan ikan yang kemudian disajikan kepada keluarga balita stunting. Dibudidaya kembangbiasi dari warga kelurahan Prajurit Kulon dengan memberus sampah sejenis ketika mengurus surat di Kelurahan. Diperlukan kerja sama antara Kelurahan, puskesmas Bimbo, Tim stunting dan keluarga pasien.

E. Kelebihan

Inovasi ini berfungsi untuk menurunkan angka stunting. Sasaran dari inovasi gempa genting yaitu Ibu hamil dan balita. Ubi yang harus diperhatikan pada waktu masih dalam kandungan sampai dengan usia 1000 hari dan sesudah lahir atau 2 tahun. Dan makanan, sayur Sosok dan Sosok Sosok Disanya Dibangi oleh warga. Kasi ini warga Sragidan untuk membantu sampah sejenis tersebut ketika mengurus surat di Kelurahan Prajurit Kulon. Sampah sejenis dijadikan makan untuk magot. Magot akan dijadikan makan ikan lele. Warga kelurahan Prajurit Kulon membudidayakan ikan lele dengan memberi makan magot, Karena inovasi ini sangat low cost high impact. Protein yang tinggi yang terdapat dari ikan lele dan menurunkan angka penderita stunting.

Inovasi GEMPA GENTING- Kota Mojokerto



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Banyuwangi

Nomor Registrasi: 64052-20220916899971

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

IPS (Integrated Pharmacy Service)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Kesehatan - RSUD Blambangan (ig2020.opd.rsudblambangankabanyuwangi)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

DASAR HUKUM

Amanat UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dipertegas dengan PP 51 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,

PMK No.11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien dan PMK 72 2016 Tentang Standard Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan yang aman bagi pasien. Sehingga inovasi IPS (Integrated Pharmacy Service dirancang dan diterapkan. Serta menjadi bagian dari Inovasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang di sahkan melalui Perbup Banyuwangi No.59 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi

PERMASALAHAN MAKRO

- Angka Medication Error terkait obat, cukup tinggi dibanggai belahan dunia
- Ketersediaan Obat nasional masih rendah
- Akuntabilitas pengelolaan perbekalan farmasi perlu di digitalisasi agar lebih akuntabel

PERMASALAHAN MIKRO

- Jumlah SDM terus berkurang dari tahun ke tahun, namun jenis layanan dan tuntutan parameter mutu layanan terus bertambah
- Pengelolaan administasi secara manual tidak mungkin dapat menyelesaikan seluruh tuntutan pemberkasan klaim dan pembayaran obat, laporan administratif, kajian, optimalisasi dan pengembangan pelayanan Instalasi Farmasi.
- Tuntutan ketersediaan obat sangat tinggi meskipun ketersediaan obat nasional/regional sering rendah.

Inovasi Integrated Pharmacy Service- Kab Banyuwangi

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya local.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Jaya memiliki prosentase penduduk miskin sebesar 13,36% atau setara dengan 12.411 jiwa. Tingginya angka kemisikinan Di Aceh Jaya secara tidak langsung daerah rawan dan rentan pangan akan besar, dikarenakan penyebab kemiskinan salah satunya adalah kelaparan yang berarti rawan pangan.

Belum adanya data yang menunjukkan desa rentan dan rawan pangan Di Kabupaten Aceh Jaya. Ketiadaan data dan informasi desa rawan pangan menyulitkan Pemerintah Kabupaten untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kerentanan dan kerawanan pangan. Melihat permasalahan tersebut Dinas Pangan Kabupaten Aceh Jaya mencoba membuat Sitem Ketahanan Pangan Aceh Jaya (SI TAMPAN JAYA).

SI TAMPAN JAYA merupakan penyediaan informasi desa rentan dan rawan pangan Aceh Jaya yang divisualisasikan dalam bentuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. SI TAMPAN JAYA di buat berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan yaitu: (1) Ketersediaan Pangan, (2) Akses Pangan dan (3) Pemanfaatan Pangan.

Diharapkan dengan adanya SI TAMPAN JAYA program/kegiatan yang dilaksanakan beberapa instansi atau stake holder dapat tepat sasaran, efisien dan komperhensif. Sehingga dapat menurunkan angka kerentanan dan kerawanan pangan yang berkorelasi langsung dengan pengurangan penduduk miskin dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Tingginya angka kemisikinan Di Aceh Jaya secara tidak langsung daerah rawan dan rentan pangan akan besar, dikarenakan penyebab kemiskinan salah satunya adalah kelaparan yang berarti rawan pangan. Belum adanya data yang menunjukkan desa rentan dan rawan pangan Di Kabupaten Aceh Jaya. Ketiadaan data dan informasi desa rawan pangan menyulitkan Pemerintah Kabupaten untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kerentanan dan kerawanan pangan. Melihat permasalahan tersebut Dinas Pangan Kabupaten Aceh Jaya mencoba membuat Sitem Ketahanan Pangan Aceh Jaya (SI TAMPAN JAYA).

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan SI TAMPAN JAYA yaitu:

- SI TAMPAN JAYA sebagai alat untuk menentukan jumlah dan penyebab desa rawan pangan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya secara praktis, mudah, cepat dan akurat.
- Menjadikan SI TAMPAN JAYA sebagai alat perencanaan dan pengambil keputusan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kerawanan pangan dan kesenjangan antar wilayah.
- Menjadikan SI TAMPAN JAYA sebagai pedoman dalam penetapan sasaran program/kegiatan oleh lintas sektor agar pembangunan untuk mengurangi prosentase penduduk miskin lebih tepat sasaran, efisien dan komperhensif.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Tingginya angka kemisikinan Di Aceh Jaya secara tidak langsung daerah rawan dan rentan pangan akan besar, dikarenakan penyebab kemiskinan salah satunya adalah kelaparan yang berarti rawan pangan. Belum adanya data yang menunjukkan desa rentan dan rawan pangan Di Kabupaten Aceh Jaya. Ketiadaan data dan informasi desa rawan pangan menyulitkan Pemerintah Kabupaten untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kerentanan dan kerawanan pangan. Melihat permasalahan tersebut Dinas Pangan Kabupaten Aceh Jaya mencoba membuat Sitem Ketahanan Pangan Aceh Jaya (SI TAMPAN JAYA).

SI TAMPAN JAYA merupakan penyediaan informasi desa rentan dan rawan pangan Aceh Jaya yang divisualisasikan dalam bentuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. SI TAMPAN JAYA di buat berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan yaitu:

(1) Ketersediaan Pangan,

(2) Akses Pangan dan

(3) Pemanfaatan Pangan.

1.11. Hasil Inovasi

Sejalan dengan amanat UU Pangan tersebut Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam RPJMK Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang difokuskan peningkatan ketersediaan pangan Utama, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kilo kalori perhari). Inovasi SITAMPAN JAYA melalui berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

SITAMPAN JAYA dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu :

- sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan,
- sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan,
- serta sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan

Diharapkan dengan adanya SI TAMPAN JAYA program/kegiatan yang dilaksanakan beberapa instansi atau stake holder dapat tepat sasaran, efisien dan komperhensif. Sehingga dapat menurunkan angka kerentanan dan kerawanan pangan yang berkorelasi langsung dengan pengurangan penduduk miskin dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Sistem Ketahanan Pangan Aceh Jaya (SITAMPAN JAYA)

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

KESALAHAN DALAM MENULIS PROPOSAL

Copy Paste

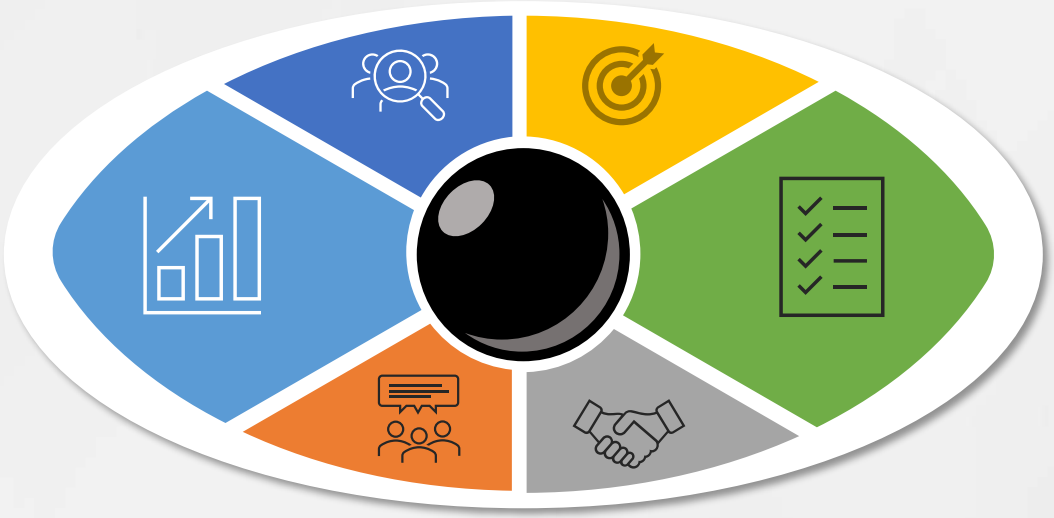
Satu Proposal bisa akomodir banyak inovasi (SAPU JAGAT)

Penulisan disusun oleh Litbangda

Proposal tidak dilakukan oleh OPD sebagai pelaksana inovasi daerah

Minim data

Data perlu untuk justifikasi mengapa suatu kebijakan publik dikeluarkan



Proposal Abstrak

Tidak jelas rancang bangun, maksud, hasil dan manfaat

Pola Pikir Penyusunan Proposal

Bertele-tele dan proposal terlalu panjang

Tidak ada benang merah

proposal harus memiliki satu topik yang runtut dari awal sampai akhir dan sesuai dengan evidence yang dilampirkan

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

KESALAHAN DALAM PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

- RANCANG BANGUN
- KEGIATAN BUKAN INOVASI DAERAH
- PENGISIAN FORM INOVASI DAERAH

KESALAHAN DALAM PENGISIAN RANCANG BANGUN

- Jumlah kata tidak mencapai 300 kata
- Duplikasi pengisian Rancang Bangun
- Penjelasan yang terlalu sumir dan hanya menguraikan kegiatan rutinitas yang biasa saja
- Tidak menjelaskan nilai kebaharuan dari kegiatan inovasi tersebut

KEGIATAN YANG BUKAN TERGOLONG SEBAGAI INOVASI DAERAH

- Program atau kegiatan tersebut merupakan hal rutinitas biasa saja yang tidak memiliki nilai kebaharuan sama sekali (*misal: pengadaan baju dinas, pemberian benih ikan*)
- Kebaharuan yang sangat sederhana tanpa menunjukan adanya dampak atau manfaat yang signifikan
- Kegiatan pembaharuan yang bukan merupakan urusan kewenangan dari pemerintah daerah terkait
- Program atau kegiatan tersebut yang biayai oleh APBN atau Program K/L Pusat



HAL YANG DILARANG DALAM PENGISIAN FORMULIR INOVASI DAERAH

- Pembubuhan nama inovasi daerah yang mengandung unsur SARA
- Penetapan tahun pelaksanaan Inovasi Daerah yang tidak sesuai
- Pemilihan Urusan Pemerintahan terkait Inovasi Daerah yang tidak sesuai

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

REJECTED ALASAN PENOLAKAN INOVASI DAERAH



01 RANCANG BANGUN TIDAK SAMPAI 300 KATA



02 DUPLIKASI RANCANG BANGUN (*COPY-PASTE*)



03 TIDAK ADA PENJELASAN METODE PEMBAHARUAN/ NILAI KEBAHARUAN DALAM RANCANG BANGUN



04 INOVASI MERUPAKAN PROGRAM/KEGIATAN K/L-INSTANSI VERTIKAL YANG DIBIAYAI MELALUI APBN



BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

Pasar Murah Mobile

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Adapun yang melatarbelakangi hadirnya inovasi Pasar Murah Mobile ini adalah sebagai berikut :

1. Menjaga ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat yang terdampak virus corona
2. Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan stock barang pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari Invovasi Pasar Murah Mobile ini adalah untuk Menjaga Stabilitas harga bahan Pok[illegible] Penting Lainnya ditengah Pandemi Covid 19.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dengan adanya Inovasi Pasar murah Mobile ini adala[illegible]jadinya Kelangkaan Barang Pokok dan Barang penting lainnya bagi masyarakat di tengah pandemi [illegible] (Covid-19).

Penjelasan terlalu umum

1.11. Hasil Inovasi

Hasil yang diperoleh dari Penerapan Pasar Murah Mobile ini adalah Masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan harga yang murah sesuai dengan daya beli Masyarakat Menengah kebawah ditengah melonjaknya harga dikarenakan adanya pandemi Virus Corona (Covid-19).

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

PENYUSUNAN LPPD WALIKOTA BERBASIS APLIKASI E-YO****A

Tahapan Inovasi*
Penerapan

Inisiator Inovasi Daerah*
OPD

Jenis Inovasi*
Digital

Bentuk Inovasi Daerah*
Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

COVID-19
Non COVID-19

Klaster Covid-19

Urusan Inovasi Daerah*
Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*
20/02/2019

Waktu Penerapan Inovasi Daerah*
20/07/2019

Rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan
Merubah Pelaporan Manual Menjadi Berbasis Aplikasi

Tujuan inovasi daerah
Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyusunan LPPD baik dari sisi waktu maupun isi materi

Manfaat yang diperoleh
LPPD makin berkualitas, cepat, mudah diakses dan tersimpan dengan baik.

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

Penerapan

Inisiator Inovasi Daerah*
OPD

Jenis Inovasi*
Digital

Bentuk Inovasi Daerah*
Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

COVID-19
Non COVID-19

Klaster Covid-19

Urusan Inovasi Daerah*
komunikasi dan informatika

Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*
02/01/2014

Waktu Penerapan Inovasi Daerah*
02/01/2019

Rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan
Finger Print adalah

Tujuan inovasi daerah
Tujuan adalah

Manfaat yang diperoleh
Manfaat adalah

Hasil Inovasi
Hasil Inovasi adalah

Tidak serius

Penggunaan Mesin Absensi Finger Print

OPTIMALISASI LAYANAN PUSKESMAS DENGAN PEMBUATAN SOFTWARE INFORMASI DI PUSKESMAS P********

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1.11. Hasil Inovasi

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Manfaat Aplikasi [redacted] adalah memberikan informasi data tenaga pendidik Paud secara online karena dengan basis teknologi internet, Mengubah pola pikir dan budaya kerja. Manfaat bagi stokeholder yaitu selu dapat terpenuhi kebutuhan data tenaga pendidik Paud bagi stakeholder pemerintah secara cepat dan akurat

Manfaat Aplikasi [redacted] adalah memberikan informasi data tenaga pendidik Paud secara online karena dengan basis teknologi internet, Mengubah pola pikir dan budaya kerja. Manfaat bagi stokeholder yaitu selu dapat terpenuhi kebutuhan data tenaga pendidik Paud bagi stakeholder pemerintah secara cepat dan akurat

Manfaat Aplikasi [redacted] adalah memberikan informasi data tenaga pendidik Paud secara online karena dapat di akses dengan basis teknologi internet, Mengubah pola pikir dan budaya kerja. Manfaat bagi stokeholder yaitu seluruh Organisasi

dapat terpenuhi kebutuhan data tenaga pendidik Paud bagi stakeholder pemerintah secara cepat dan akurat

Manfaat Aplikasi [redacted] adalah memberikan informasi data tenaga pendidik Paud secara online karena dapat di akses dengan basis teknologi internet, Mengubah pola pikir dan budaya kerja. Manfaat bagi stokeholder yaitu seluruh Organisasi dapat terpenuhi kebutuhan data tenaga pendidik Paud bagi stakeholder pemerintah secara cepat dan akurat

Aplikasi [redacted] merupakan aplikasi yang bertujuan memberikan kemudahan dan percepatan bagi tenaga pendid PAUD dalam pemenuhan pengelolaan data untuk menunjang program pemerintah. Pada tahun 2022 semua tenag pendidik PAUD sudah terdata dalam system informasi.

Manfaat Aplikasi [redacted] adalah memberikan informasi data tenaga pendidik Paud secara online karena dapat di akses dengan basis teknologi internet, Mengubah pola pikir dan budaya kerja. Manfaat bagi stokeholder yaitu seluruh Organisasi dapat terpenuhi kebutuhan data tenaga pendidik Paud bagi stakeholder pemerintah secara cepat dan akurat

Manfaat Aplikasi [redacted] adalah memberikan informasi data tenaga pendidik Paud secara online karena dapat di akses dengan basis teknologi internet, Mengubah pola pikir dan budaya kerja. Manfaat bagi stokeholder yaitu seluruh Organisasi dapat terpenuhi kebutuhan data tenaga pendidik Paud bagi stakeholder pemerintah secara cepat dan akurat

APLIKASI S*****S

COPY PASTE PARAGRAF

Pakai text generator

Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*

07/06/2021

Waktu Penerapan Inovasi Daerah*

06/12/2021

Rancang bangun (Minimal 300 kata) *

Pengembangan menyelenggarakan Innovative Government Award (IGA) setiap tahun untuk menentukan indek inovasi daerah dan peringkat inovasi daerah. Agar lebih efektif dan efisien dalam menginventarisir inovasi yang ada di OPD Pemprov Jambi maka Balitbangda Provinsi Jambi sebagai leader Inovasi daerah melaksanakan Lomba Inovasi lingkup OPD Pemprov Jambi melalui Aplikasi SI-Jagoan, untuk mendorong kompetesi positif antar OPD Pemprov Jambi berinovasi secara transparan dan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang menjadi kewenangan Pemprov Jambi.

tambahin lagi rancang bangunnyaa.....

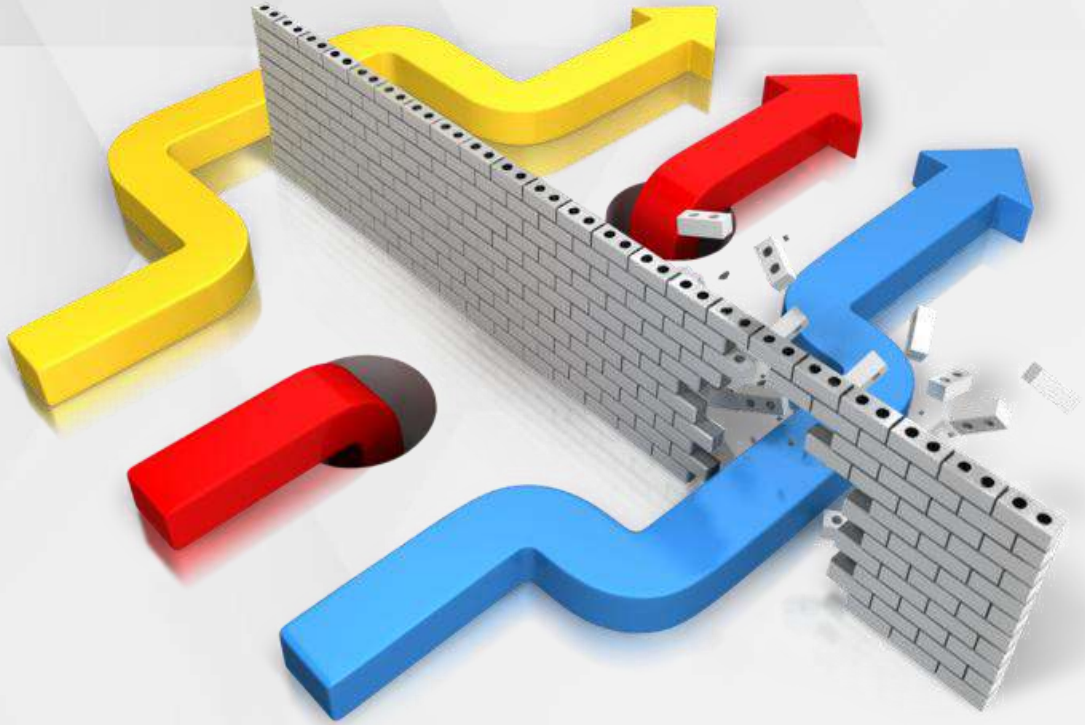
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ullamcorper, est ut tristique aliquam, libero velit faucibus arcu, vitae hendrerit erat dui et est. Sed varius eu mi non tincidunt. Pellentesque cursus dignissim placerat. Sed ultricies nisl in maximus rhoncus. Mauris semper sollicitudin felis, vitae elementum ipsum elementum ut. Curabitur in augue sem. Quisque ultricies, ante at tempus dictum, lectus quam tempor nisl, ac iaculis diam ipsum mollis leo. Etiam porta tincidunt neque eget ultricies. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut consectetur tellus mi, vitae aliquet purus facilisis rutrum. Maecenas egestas nulla nec egestas faucibus.

Duis vehicula facilisis convallis. Aliquam laoreet vehicula molestie. Quisque eu quam imperdiet, molestie nunc ac, iaculis mi. Nunc cursus vestibulum lectus malesuada iaculis. Ut et sollicitudin ipsum, quis suscipit velit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum id dui bibendum, tincidunt lacus ac, rutrum arcu.

Cras justo massa, maximus nec mattis ac, mattis eget turpis. Suspendisse luctus tellus vel turpis maximus, non imperdiet augue mattis. In feugiat laoreet enim quis auctor. Nam ac vehicula velit. In id arcu leo. Integer magna ligula, malesuada et mauris sed, accumsan hendrerit elit. Aenean tincidunt non lacus nec euismod.

Donec porta a risus ut lobortis. In elit leo, gravida nec elit quis, molestie auctor nunc. Quisque auctor metus vulputate mauris ultricies, eu bibendum eros varius. Maecenas eu ligula id quam sodales accumsan. Donec auctor, risus tempus molestie lobortis, elit turpis aliquam sapien, suscipit aliquet sapien est eget risus. Nunc viverra, leo non accumsan egestas, dui mauris aliquam nisi, quis mollis dolor massa at neque. Vestibulum in purus egestas, tempor urna id, malesuada metus. Phasellus id fermentum ipsum. Praesent ut hendrerit urna. Quisque mattis nibh nisi, quis lobortis est consectetur sed. Donec id ornare nisl.

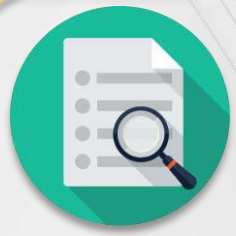
BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN



PENGISIAN SATUAN INOVASI DAERAH DAN BUKTI DUKUNG

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

PENYESUAIAN PELAPORAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024



01

PROFIL INOVASI DAERAH

Penyempurnaan pengisian form inovasi daerah serta penambahan kolom isian Sertifikat HAKI dan Penghargaan Inovasi Daerah

02

DEFINISI OPERASIONAL

Penyesuaian definisi terhadap indikator-indikator tertentu guna penjelasan yang lebih komprehensif





03

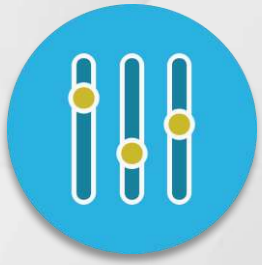
INDIKATOR

Modifikasi serta penyesuaian terhadap indikator yang dinilai perlu diperbaharui

04

PARAMETER

Penyesuaian Parameter dalam rangka peningkatan kualitas hasil pelaporan inovasi daerah



BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

BEBERAPA PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN INDIKATOR
SATUAN INOVASI DAERAH (SID)



01 Indikator Kemudahan Informasi

Penyempurnaan Indikator Kemudahan Informasi melalui capaian metode yang ada, yakni tatap muka/jemput bola/noken/layanan email/media sosial/telp/website/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios)

02 Indikator Layanan Terintergrasi

Penyesuaian terhadap indikator sebelumnya yakni **Online Sistem** yang di sempurnakan guna mengakomodir laporan inovasi bersifat non digital. Indikator Layana Terintegrasi akan memiliki 2 Sub Indikator pilihan yang mengakomodir Inovasi Digital maupun Inovasi Non Digital

03 Indikator Alat Kerja

Penyesuaian Nama Indikator serta Definisi Operasional yang sebelumnya merupakan Indikator **Penggunaan IT**

BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN

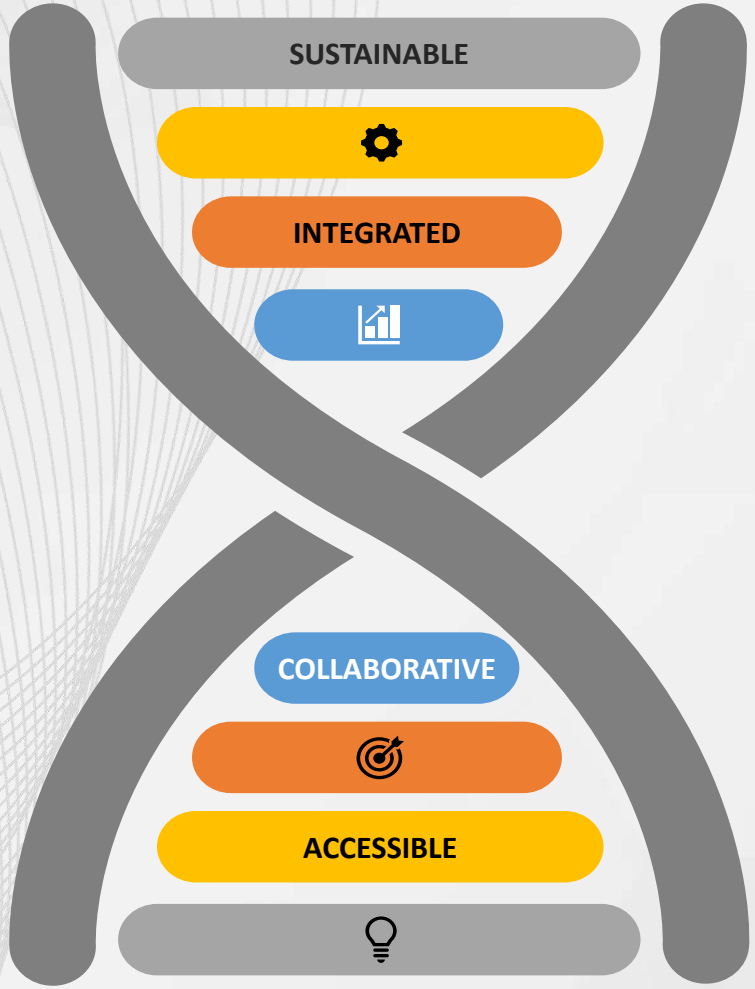
KARAKTERISTIK INOVASI KEMATANGAN TINGGI

SUSTAINABLE

1. INOVASI MEMILIKI PIJAKAN OPERASIONAL YANG KUAT DAN STABIL
2. INOVASI TIDAK BERBASIS AKTOR, MELAINKAN BERBASIS TIM/SISTEM;
3. PROSES BIMTEK DAN PEWARISAN INTELEKTUAL;
4. KONSISTEN MENDAPATKAN DUKUNGAN ANGGARAN

COLLABORATIVE

1. MEMILIKI TIM EFEKTIF YANG SUPPORTIVE DAN LINTAS KEAHLIAN/TUPOKSI;
2. BEKERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER2 KUNCI SEPERTI AKADEMISI, MEDIA, SWASTA, MASYARAKAT
3. PELIBATAN EKSTERNAL DALAM MONEV INOVASI;



INTEGRATED

1. INOVASI TIDAK BERJALAN TERPISAH (SILO) MELAINKAN TERGABUNG DALAM SUATU LAYANAN INTEGRATIF;
2. INOVASI DPT DIRENCANAKAN DAN KONSISTEN MJD BAGIAN DARI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

ACCESSIBLE

1. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
2. KEMUDAHAN AKSES BAGI MASYARAKAT (OPEN AND WIDE ACCESS)
3. PRASYARAT REPLIKASI TERSEDIA

1. REGULASI INOVASI DAERAH

Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah

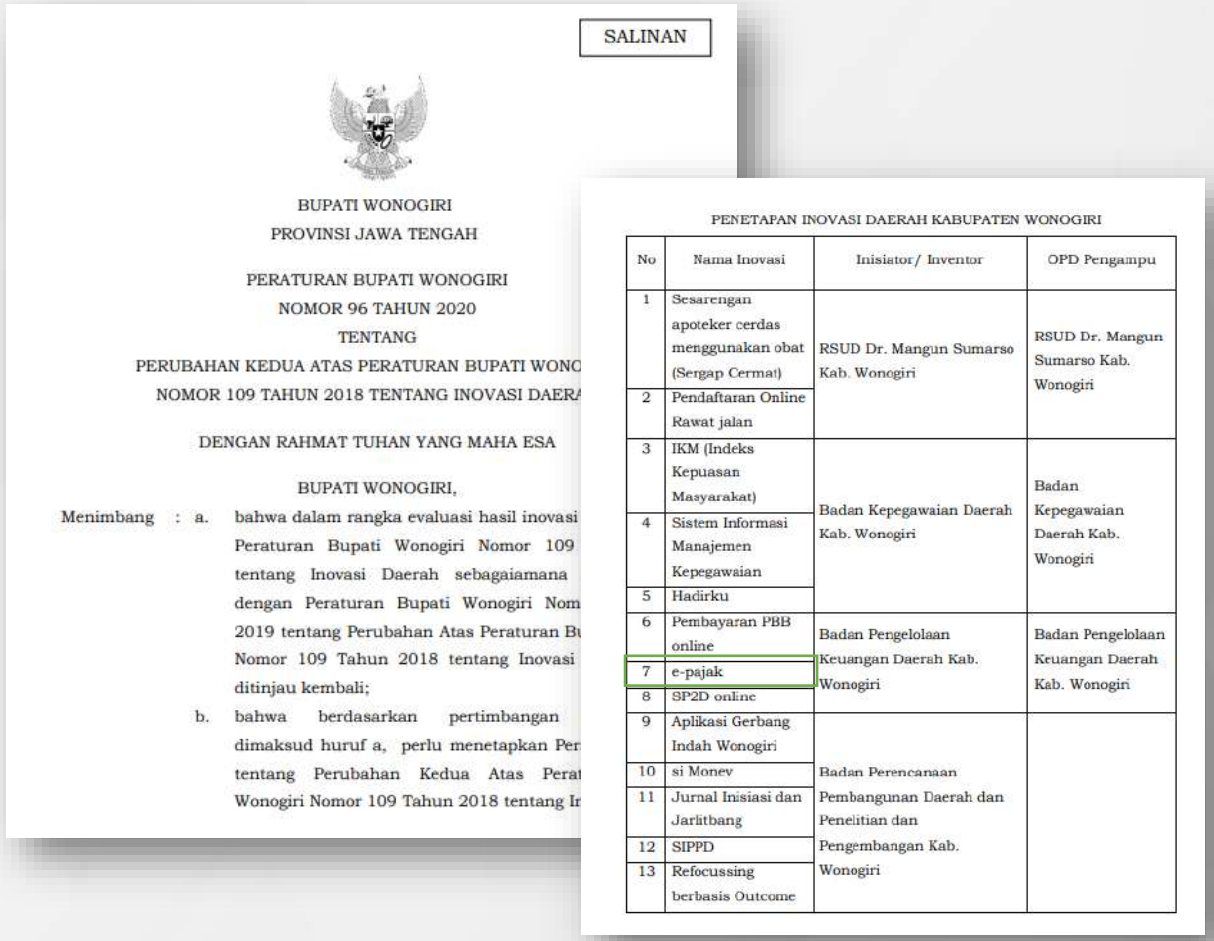
Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan:

- **SK Bupati atau SK tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD a.n. Bupati (nilai: 3)**
- **SK/regulasi tentang penetapan nama inovasi daerah tidak ada/tidak sesuai dengan ketentuan (nilai: 0)**

Perangkat Daerah Provinsi menurut PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas; dan
5. Badan.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menurut PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

BOBOT 3



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONO
NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG INOVASI DAERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi hasil inovasi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 tentang Inovasi Daerah sebagaiamana dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nom 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bu Nomor 109 Tahun 2018 tentang Inovasi ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Per tentang Perubahan Kedua Atas Perat Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 tentang In

PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

No	Nama Inovasi	Inisiator/ Inventor	OPD Pengampu
1	Sesarengan apoteker cerdas menggunakan obat (Sergap Cermat)	RSUD Dr. Mangun Sumarso Kab. Wonogiri	RSUD Dr. Mangun Sumarso Kab. Wonogiri
2	Pendaftaran Online Rawat jalan		
3	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri
4	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		
5	Hadirku		
6	Pembayaran PBB online	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Wonogiri	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Wonogiri
7	e-pajak		
8	SP2D online		
9	Aplikasi Gerbang Indah Wonogiri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kab. Wonogiri	
10	si Monev		
11	Jurnal Inisiasi dan Jarlitbang		
12	SIPPD		
13	Refocussing berbasis Outcome		

Apabila berupa SK payung, *highlight* Nama Inovasi

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi (pdf)

2. KETERSEDIAAN SDM TERHADAP INOVASI DAERAH

Jumlah SDM yang mengelola inovasi

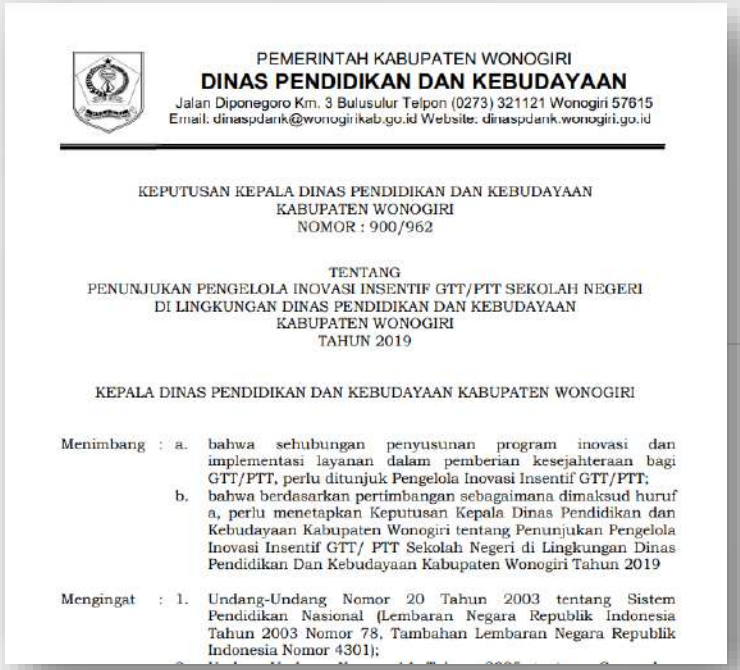
Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah:

- **Lebih dari 30 SDM beserta peran (nilai: 6)**
- **Jumlah SDM ≤ 30 (nilai: 0)**

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD (pdf)

BOBOT 2



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telpon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Email: dinaspdank@wonogirikab.go.id Website: dinaspdank.wonogiri.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 900/962

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA INOVASI INSENTIF GTT/PTT SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa sehubungan penyusunan program inovasi dan implementasi layanan dalam pemberian kesejahteraan bagi GTT/PTT, perlu ditunjuk Pengelola Inovasi Insentif GTT/PTT;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan Pengelola Inovasi Insentif GTT/ PTT Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Pengelola Inovasi Insentif GTT/PTT Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 pada Lampiran Keputusan ini.

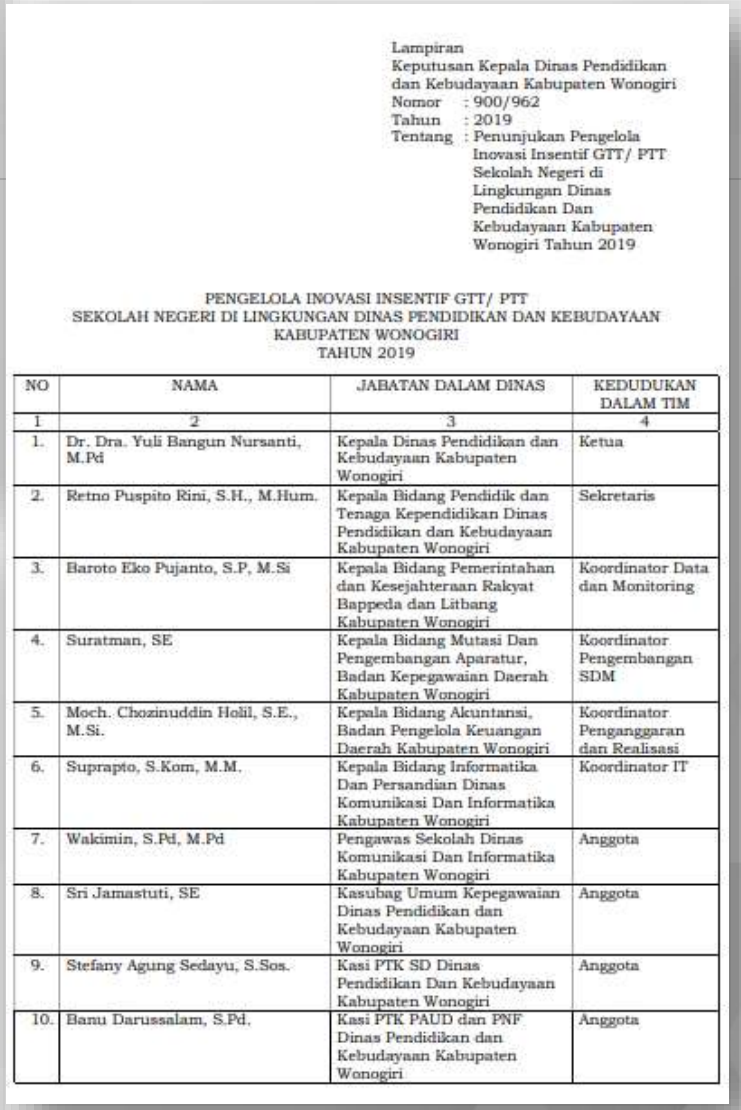
KEDUA : Pengelola Inovasi bekerja sama secara tim dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 31 Desember 2019

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri

YULI BANGUN NURSANTI



Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri
Nomor : 900/962
Tahun : 2019
Tentang : Penunjukan Pengelola Inovasi Insentif GTT/ PTT Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

PENGELOLA INOVASI INSENTIF GTT/ PTT
SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Dra. Yuli Bangun Nursanti, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Ketua
2.	Retno Puspito Rini, S.H., M.Hum.	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Sekretaris
3.	Baroto Eko Pujanto, S.P, M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri	Koordinator Data dan Monitoring
4.	Suratman, SE	Kepala Bidang Mutasi Dan Pengembangan Aparatur, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri	Koordinator Pengembangan SDM
5.	Moch. Chozinuddin Holil, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri	Koordinator Penganggaran dan Realisasi
6.	Suprapto, S.Kom, M.M.	Kepala Bidang Informatika Dan Persandian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonogiri	Koordinator IT
7.	Wakimin, S.Pd, M.Pd	Pengawas Sekolah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonogiri	Anggota
8.	Sri Jamastuti, SE	Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota
9.	Stefany Agung Sedayu, S.Sos.	Kasi PTK SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota
10.	Banu Darussalam, S.Pd.	Kasi PTK PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota

3. DUKUNGAN ANGGARAN

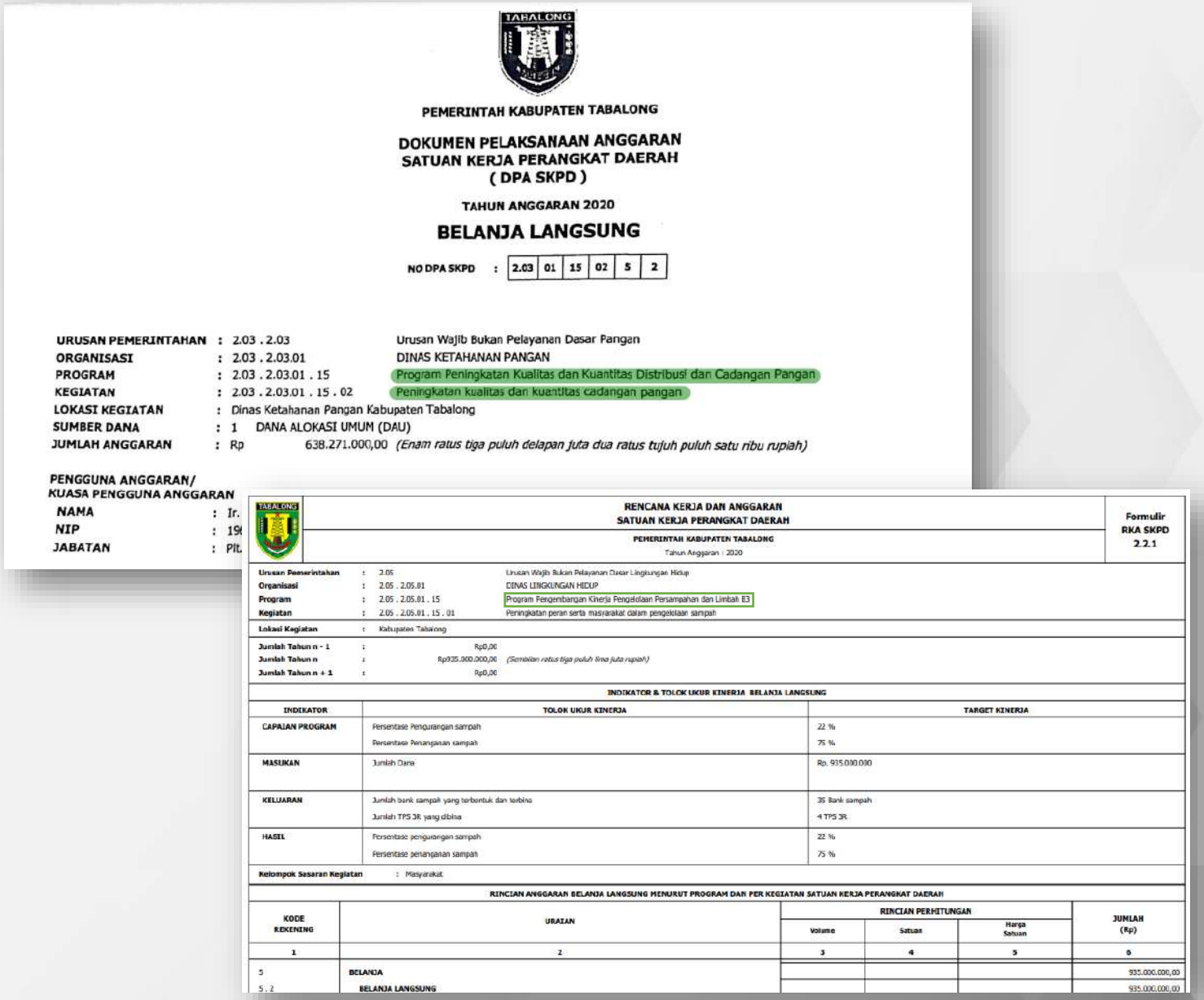
Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi

Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah:

- **Anggaran dialokasikan pada kegiatan inovasi di T-0, T-1 dan T-2 (nilai: 6)**
- **Anggaran tidak dialokasikan pada kegiatan inovasi di T-0, T-1 dan T-2 (nilai: 0)**

KETERANGAN:

- Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah
- Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (DPA, RAB, dsb) (pdf)



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 2.03 | 01 | 15 | 02 | 5 | 2

URUSAN PEMERINTAHAN	:	2.03 . 2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
ORGANISASI	:	2.03 . 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM	:	2.03 . 2.03.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Distribusi dan Cadangan Pangan
KEGIATAN	:	2.03 . 2.03.01 . 15 . 02	Peningkatan kualitas dan kuantitas cadangan pangan
LOKASI KEGIATAN	:	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong	
SUMBER DANA	:	1 DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp 638.271.000,00	*(Enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Ir.
NIP : 19
JABATAN : Plt.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Tahun Anggaran : 2020

Formulir RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan	:	2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi	:	2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
Kegiatan	:	2.05 . 2.05.01 . 15 . 01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Tabalong	
Jumlah Tahun n - 1	:	Rp0,00	
Jumlah Tahun n	:	Rp935.000.000,00	*(Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah)*
Jumlah Tahun n + 1	:	Rp0,00	

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM	Persentase Pengurangan sampah	22 %
	Persentase Penanganan sampah	75 %
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 935.000.000
KELUARAN	Jumlah bank sampah yang terbentuk dan terbina	35 Bank sampah
	Jumlah TPS 3R yang dibina	4 TPS 3R
HASIL	Persentase pengurangan sampah	22 %
	Persentase penanganan sampah	75 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				935.000.000,00
5 . 2	BELANJA LANGSUNG				935.000.000,00

BOBOT 2

Highlight Nama/Program Inovasi

4. ALAT KERJA

Alat kerja dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan

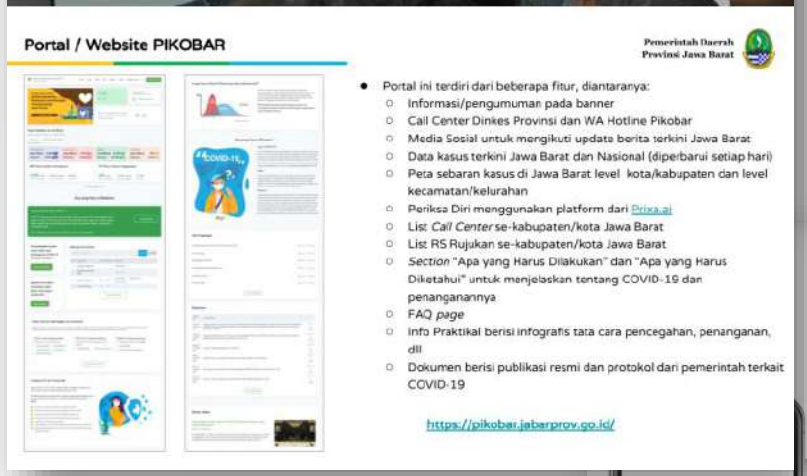
Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah:

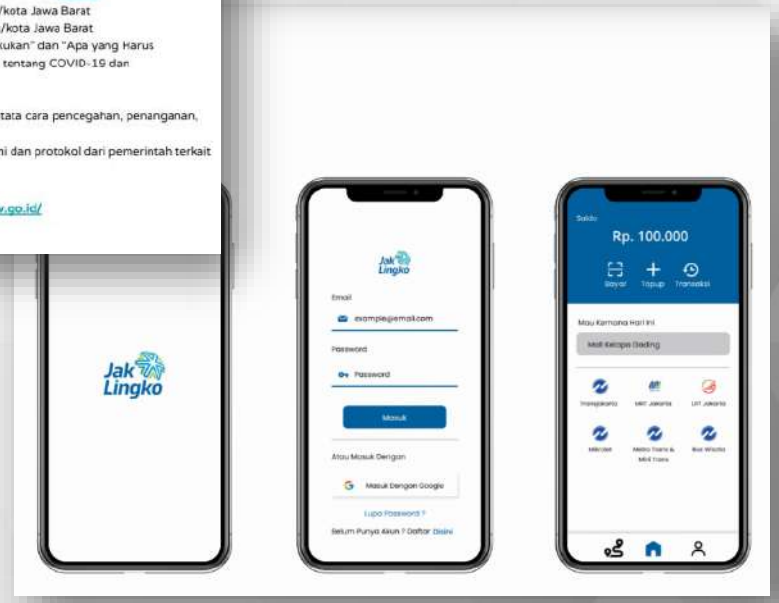
- **Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online /Artificial Intelligence/media sosial (nilai: 6)**
- **Pelaksanaan kerja tidak didukung sistem informasi online /Artificial Intelligence/media sosial (nilai: 0)**

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)







BOBOT 2

5. BIMTEK INOVASI

Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek

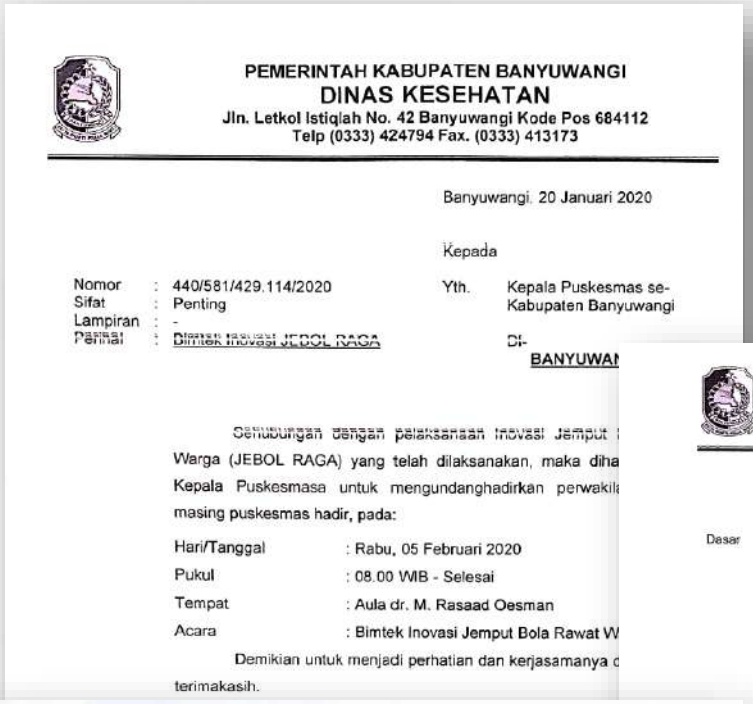
Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan terkait substansi urusan inovasi dalam 2 (dua) tahun terakhir:

- **Dalam 2 tahun terakhir pernah minimal 3 kali bimtek/training/TOT (nilai: 3)**
- **Dalam 2 tahun terakhir < 3 kali kegiatan bimtek/training/TOT (nilai: 0)**

KETERANGAN:

- Undangan, bukti kehadiran (daftar hadir/surat tugas/sertifikat dsb))

BOBOT 1



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KESEHATAN
Jln. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi Kode Pos 684112
Telp (0333) 424794 Fax. (0333) 413173

Banyuwangi, 20 Januari 2020

Kepada

Nomor : 440/581/429.114/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Bimtek Inovasi JEBOL RAGA

Yth. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Banyuwangi

Di-
BANYUWAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Inovasi Jemput
Warga (JEBOL RAGA) yang telah dilaksanakan, maka diha
Kepala Puskesmasa untuk mengundanghadirkan perwakil
masing puskesmas hadir, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Februari 2020
Pukul : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula dr. M. Rasaad Oesman
Acara : Bimtek Inovasi Jemput Bola Rawat W

Demikian untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya
terimakasih.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KESEHATAN
Jln. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi Kode Pos 684112
Telp (0333) 424794 Fax. (0333) 413173

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 094/583/429.114/2020

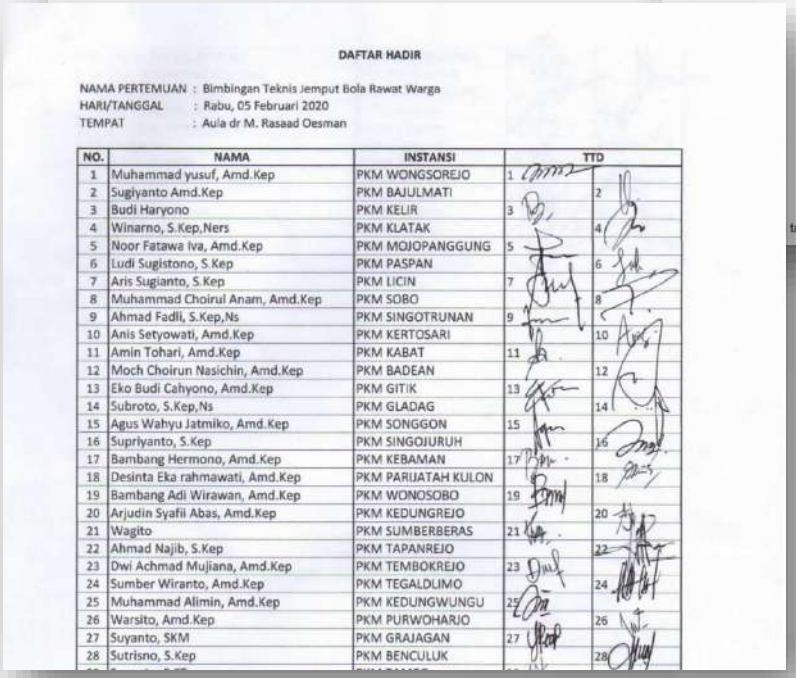
Dasar : DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat (SPGDT) Kode Rekening 1.02.01.18.10.5.2

MEMERINTAHKAN :

Nama : dr. KURNIYANTO
NIP : 19680129 200212 2 1001
Jabatan : Kabid Pelayanan Kesehatan
Pangkat/Gol : Pembina/ IVA
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

: Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Bimbingan Teknis Program Jemput Bola Rawat Warga pada hari/tanggal : Rabu dan Jum'at, 5 dan 7 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan tanggungjawab.



DAFTAR HADIR

NAMA PERTEMUAN : Bimbingan Teknis Jemput Bola Rawat Warga
HARI/TANGGAL : Rabu, 05 Februari 2020
TEMPAT : Aula dr M. Rasaad Oesman

NO.	NAMA	INSTANSI	TTD
1	Muhammad yusuf, Amd.Kep	PKM WONGSOREJO	1
2	Sugiyanto Amd.Kep	PKM BAJULMATI	2
3	Budi Haryono	PKM KELIR	3
4	Winarno, S.Kep,Ners	PKM KLATAK	4
5	Noor Fatawa Iva, Amd.Kep	PKM MOJOPANGGUNG	5
6	Ludi Sugistono, S.Kep	PKM PASPAN	6
7	Aris Sugianto, S.Kep	PKM LICIN	7
8	Muhammad Choirul Anam, Amd.Kep	PKM SOBO	8
9	Ahmad Fadli, S.Kep,Ns	PKM SINGOTRUNAN	9
10	Anis Setyowati, Amd.Kep	PKM KERTOSARI	10
11	Amin Tohari, Amd.Kep	PKM KABAT	11
12	Moch Choirun Nasichin, Amd.Kep	PKM BADEAN	12
13	Eko Budi Cahyono, Amd.Kep	PKM GITIK	13
14	Subroto, S.Kep,Ns	PKM GLADAG	14
15	Agus Wahyu Jatmiko, Amd.Kep	PKM SONGGON	15
16	Supriyanto, S.Kep	PKM SINGOJURUH	16
17	Bambang Hermono, Amd.Kep	PKM KEBAMAN	17
18	Desinta Eka rahmawati, Amd.Kep	PKM PARIJATAH KULON	18
19	Bambang Adi Wirawan, Amd.Kep	PKM WONOSOBO	19
20	Arjudin Syafii Abas, Amd.Kep	PKM KEDUNGREJO	20
21	Wagito	PKM SUMBERBERAS	21
22	Ahmad Najib, S.Kep	PKM TAPANREJO	22
23	Dwi Achmad Mujiana, Amd.Kep	PKM TEMBOKREJO	23
24	Sumber Wiranto, Amd.Kep	PKM TEGALDLIMO	24
25	Muhammad Alimin, Amd.Kep	PKM KEDUNGWUNGU	25
26	Warsito, Amd.Kep	PKM PURWOHARJO	26
27	Suyanto, SKM	PKM GRAJAGAN	27
28	Sutrisno, S.Kep	PKM BENCULUK	28

6. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN INOVASI DALAM RKPD

Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah

Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah:

- **Inovasi daerah tertuang dalam RKPD/dokumen perencanaan sejenis T-1, T-2 dan T-0 (nilai: 6)**
- **Inovasi daerah tidak tertuang dalam RKPD/dokumen perencanaan sejenis T-1, T-2 dan T-0 (nilai: 0)**

KETERANGAN:

- Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah.
- Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)





BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

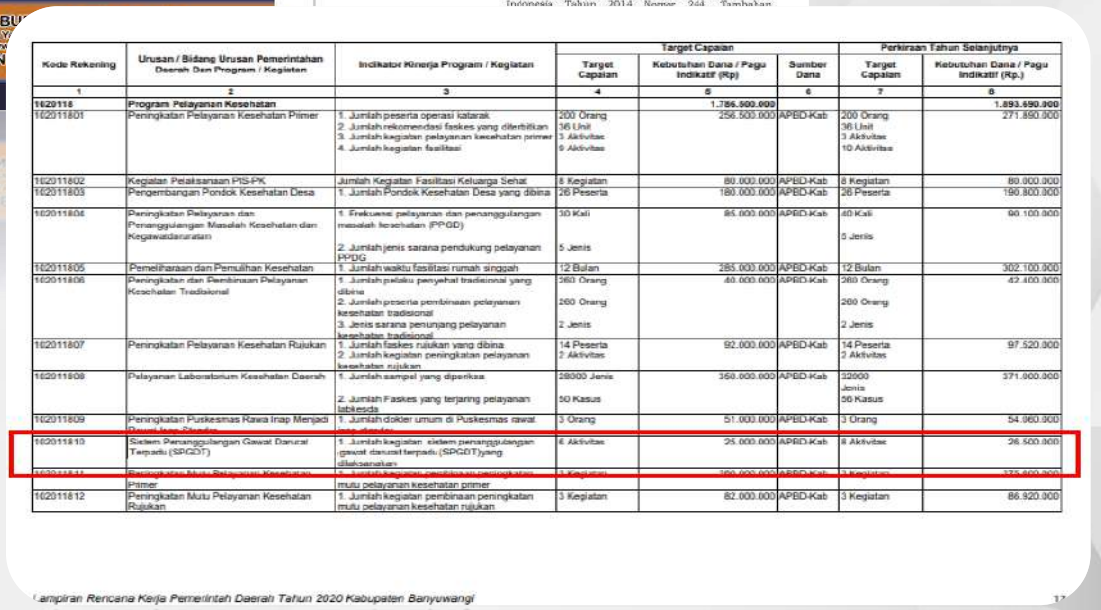
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian			Perkiraan Tahun Selanjutnya	
			Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1620118	Program Pelayanan Kesehatan			1.786.900.000			1.893.690.000
1620111801	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	1. Jumlah peserta operasi katarak 2. Jumlah rekomendasi faskes yang diterbitkan 3. Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan primer 4. Jumlah kegiatan fasilitasi	200 Orang 36 Unit 3 Aktivitas 9 Aktivitas	256.500.000	APBD-Kab	200 Orang 36 Unit 3 Aktivitas 10 Aktivitas	271.890.000
1620111802	Kegiatan Pelaksanaan PIS-PK	Jumlah Kegatan Fasilitasi Keluarga Sehat	8 Kegiatan	80.000.000	APBD-Kab	8 Kegiatan	80.000.000
1620111803	Pengembangan Pondok Kesehatan Desa	1. Jumlah Pondok Kesehatan Desa yang dibina	26 Peserta	180.000.000	APBD-Kab	26 Peserta	190.800.000
1620111804	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Kegawatdaruratan	1. Frekuensi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (PPGD) 2. Jumlah jenis sarana pendukung pelayanan PPDG	30 Kali 5 Jenis	85.000.000	APBD-Kab	40 Kali 5 Jenis	90.100.000
1620111805	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1. Jumlah waktu fasilitasi rumah singgah	12 Bulan	285.000.000	APBD-Kab	12 Bulan	302.100.000
1620111806	Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1. Jumlah pelaku penyehat tradisional yang dibina 2. Jumlah peserta pembinaan pelayanan kesehatan tradisional 3. Jenis sarana penunjang pelayanan kesehatan tradisional	260 Orang 260 Orang 2 Jenis	40.000.000	APBD-Kab	260 Orang 260 Orang 2 Jenis	42.400.000
1620111807	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Jumlah faskes rujukan yang dibina 2. Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	14 Peserta 2 Aktivitas	92.000.000	APBD-Kab	14 Peserta 2 Aktivitas	97.520.000
1620111808	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	1. Jumlah sampel yang diperiksa 2. Jumlah Faskes yang terjaring pelayanan labkesda	28000 Jenis 56 Kasus	350.000.000	APBD-Kab	32900 Jenis 56 Kasus	371.000.000
1620111809	Peningkatan Puskesmas Rawa Inap Menjadi [illegible]	1. Jumlah dokter umum di Puskesmas rawat [illegible]	3 Orang	51.000.000	APBD-Kab	3 Orang	54.060.000
1620111810	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1. Jumlah kegiatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)yang dilaksanakan	6 Aktivitas	25.000.000	APBD-Kab	8 Aktivitas	26.500.000
1620111811	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	mutu pelayanan kesehatan primer	[illegible] Kegiatan	100.000.000	APBD-Kab	[illegible] Kegiatan	106.000.000
1620111812	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	3 Kegiatan	82.000.000	APBD-Kab	3 Kegiatan	86.920.000

Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi

BOBOT 2

Highlight Nama/Program Inovasi

7. KETERLIBATAN AKTOR INOVASI

Keikutsertaan unsur *Stakeholder* dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)

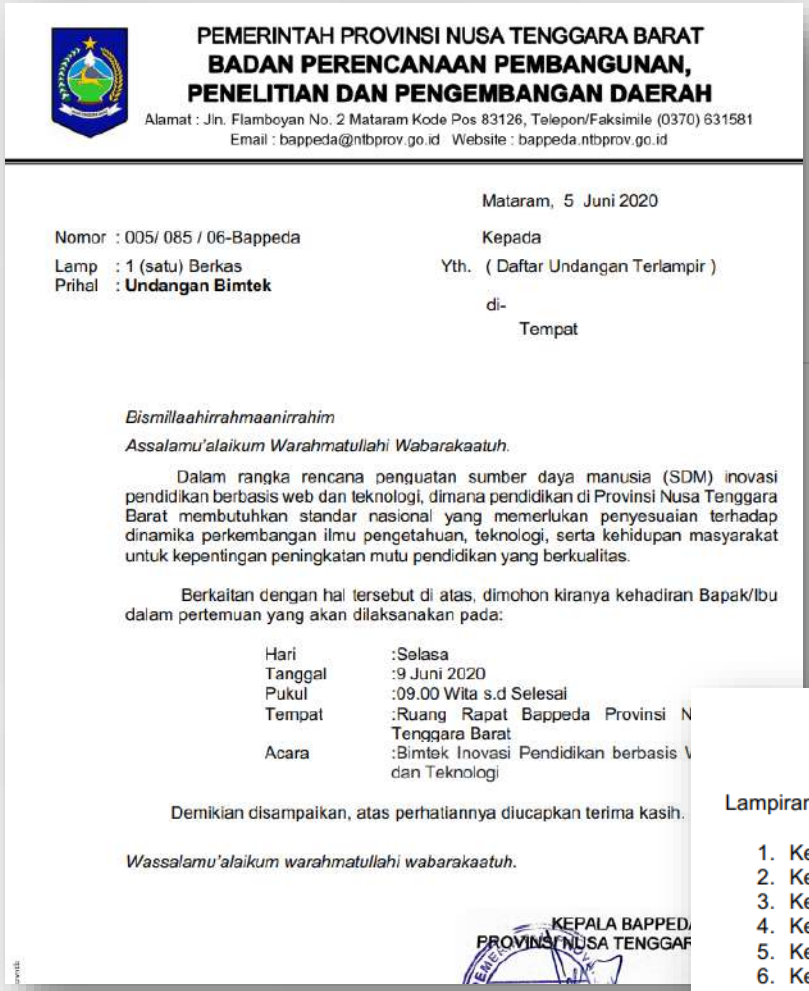
Pilih jumlah unsur stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media:

- **Inovasi melibatkan 5 aktor atau lebih (nilai: 3)**
- **Inovasi melibatkan kurang dari 5 aktor (nilai: 0)**

Unsur *Stakeholder* meliputi:

1. Pemerintah
2. Pelaku Bisnis
3. Komunitas
4. Akademisi
5. Media Masa,dsb

BOBOT 1



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Alamat : Jln. Flamboyan No. 2 Mataram Kode Pos 83126, Telepon/Faksimile (0370) 631581
Email : bappeda@ntbprov.go.id Website : bappeda.ntbprov.go.id

Mataram, 5 Juni 2020

Nomor : 005/ 085 / 06-Bappeda
Lamp : 1 (satu) Berkas
Prihal : **Undangan Bimtek**

Kepada
Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-
Tempat

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dalam rangka rencana penguatan sumber daya manusia (SDM) inovasi pendidikan berbasis web dan teknologi, dimana pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya kehadiran Bapak/Ibu dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari :Selasa
Tanggal :9 Juni 2020
Pukul :09.00 Wita s.d Selesai
Tempat :Ruang Rapat Bappeda Provinsi N Tenggara Barat
Acara :Bimtek Inovasi Pendidikan berbasis V dan Teknologi

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KEPALA BAPPED
PROVINSI NUSA TENGGAR



Daftar Undangan :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB
3. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
4. Kepala BPBD Banyuwangi
5. Ketua STIKES Banyuwangi
6. Ketua Akademi Kesehatan Rustida
7. Kepala Puskesmas Se-Kab Banyuwangi
8. Ketua Baznas Kab. Banyuwangi
9. Pimpinan Ranting Muslimat NU Banyuwangi
10. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi
11. Radar Banyuwangi
12. Radio VIS FM
13. Radio Blambangan FM
14. PT. Tri Sapta Jaya
15. PT. Banyuwangi Pharma Utama

- Pemerintah
- Pelaku Bisnis
- Media Massa
- Akademisi
- Organisasi/Komunitas



DAFTAR UNDANGAN :

Lampiran

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB.
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB.
4. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB.
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB.
6. Kepala Biro Administrasi Kerjasama Provinsi NTB.
7. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB.
8. Rektor Universitas Mataram.
9. Rektor Universitas Teknologi Sumbawa.
10. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
11. Rektor Nahdatul Wathan Mataram.
12. Rektor IAIN Mataram.

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat/ dokumen kerjasama dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)

8. PELAKSANA INOVASI DAERAH

Penetapan tim pelaksana inovasi daerah

Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah:

- **Tim pelaksana ditetapkan dengan SK Bupati atau SK Kepala OPD an. Bupati (nilai: 3)**
- **Tim pelaksana tidak ditetapkan dengan SK Bupati atau SK Kepala OPD an. Bupati (nilai: 0)**

BOBOT 1



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/208/KEP/429.011/2018
TANGGAL : 07 Agustus 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM EFEKTIF PELAKSANAAN JEMPUT BOLA RAWAT WARGA KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Banyuwangi.
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.	KELOMPOK KERJA PELAYANAN KESEHATAN	
	KETUA POKJA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. 4. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Banyuwangi.
4.	KELOMPOK KERJA PEMBIAYAAN	
	KETUA POKJA	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	ANGGOTA	1. Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi. 2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/208/KEP/429.011/2018
TENTANG
TIF PELAKSANAAN JEMPUT BOLA RAWAT WARGA
KABUPATEN BANYUWANGI

a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas serta makin meningkatnya kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah dituntut untuk semakin meningkatkan pelayanannya, baik dari segi keterjangkauan maupun dari segi kualitas pelayanan;
b. bahwa untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan pelayanan Jemput

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah

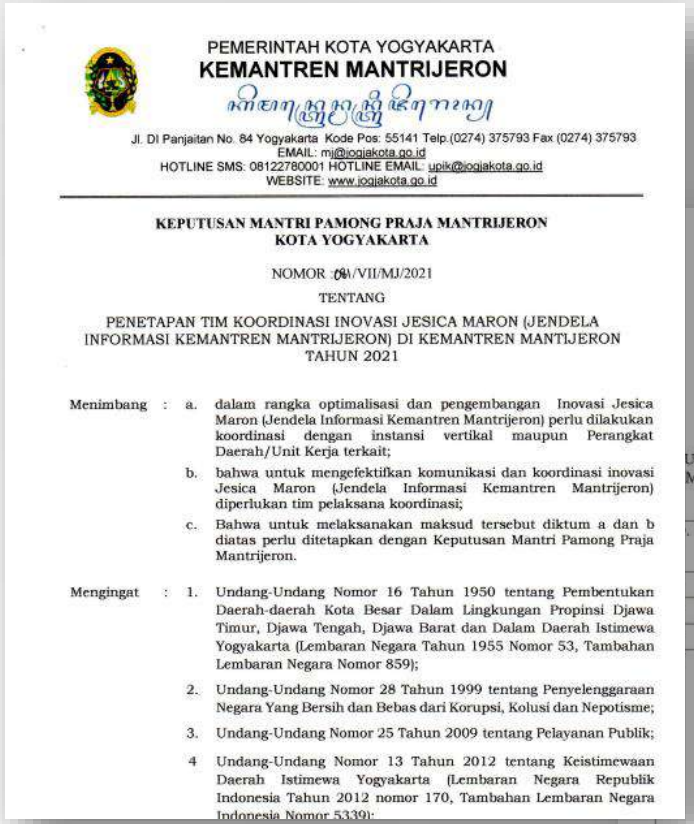
9. JEJARING INOVASI

Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)

Pilih jumlah OPD yang terlibat dalam penerapan inovasi daerah:

- **Inovasi melibatkan 5 OPD atau lebih (nilai: 3)**
- **Inovasi melibatkan kurang dari 5 OPD (nilai: 0)**

BOBOT 1



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MANTRIJERON

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793 Fax (0274) 375793
EMAIL: mj@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

NOMOR /VII/MJ/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI KEMANTREN MANTRIJERON) DI KEMANTREN MANTIJERON TAHUN 2021

Menimbang : a. dalam rangka optimalisasi dan pengembangan Inovasi Jesica Maron (Jendela Informasi Kemantren Mantrijeron) perlu dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal maupun Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;

b. bahwa untuk mengefektifkan komunikasi dan koordinasi inovasi Jesica Maron (Jendela Informasi Kemantren Mantrijeron) diperlukan tim pelaksana koordinasi;

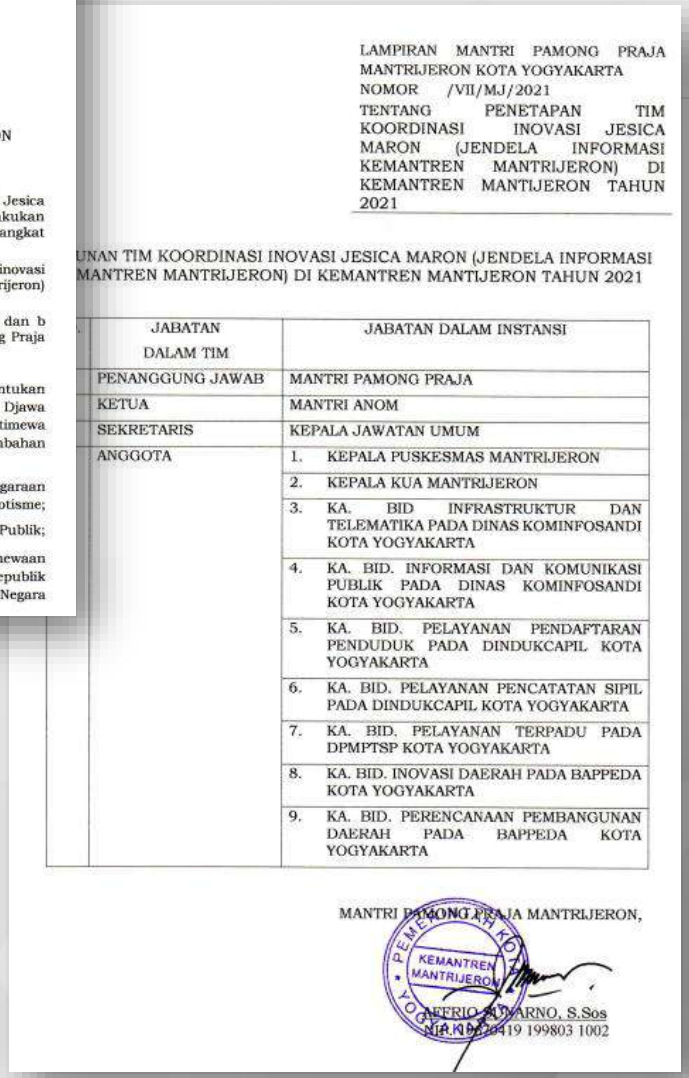
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diktum a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);



LAMPIRAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA
NOMOR /VII/MJ/2021
TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI KEMANTREN MANTRIJERON) DI KEMANTREN MANTIJERON TAHUN 2021

UNAN TIM KOORDINASI INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI MANTREN MANTRIJERON) DI KEMANTREN MANTIJERON TAHUN 2021

	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	PENANGGUNG JAWAB	MANTRI PAMONG PRAJA
	KETUA	MANTRI ANOM
	SEKRETARIS	KEPALA JAWATAN UMUM
	ANGGOTA	1. KEPALA PUSKESMAS MANTRIJERON
		2. KEPALA KUA MANTRIJERON
		3. KA. BID INFRASTRUKTUR DAN TELEMATIKA PADA DINAS KOMINFOSANDI KOTA YOGYAKARTA
		4. KA. BID. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMINFOSANDI KOTA YOGYAKARTA
		5. KA. BID. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA
		6. KA. BID. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PADA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA
		7. KA. BID. PELAYANAN TERPADU PADA DPMPTSP KOTA YOGYAKARTA
		8. KA. BID. INOVASI DAERAH PADA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
		9. KA. BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON,

JEFFRIO SUKARNO, S.Sos
NIP. 19[illegible]19 199803 1002

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)

10. SOSIALISASI INOVASI DAERAH

Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)

Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah:

- **Penyebarluasan informasi melalui Media Berita/Media Massa (nilai: 3)**
- **Penyebarluasan informasi tidak melalui Media Berita/Media Massa (nilai: 0)**

BOBOT 1

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) (jpeg/jpg/png





11. PEDOMAN TEKNIS

Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/*manual book*

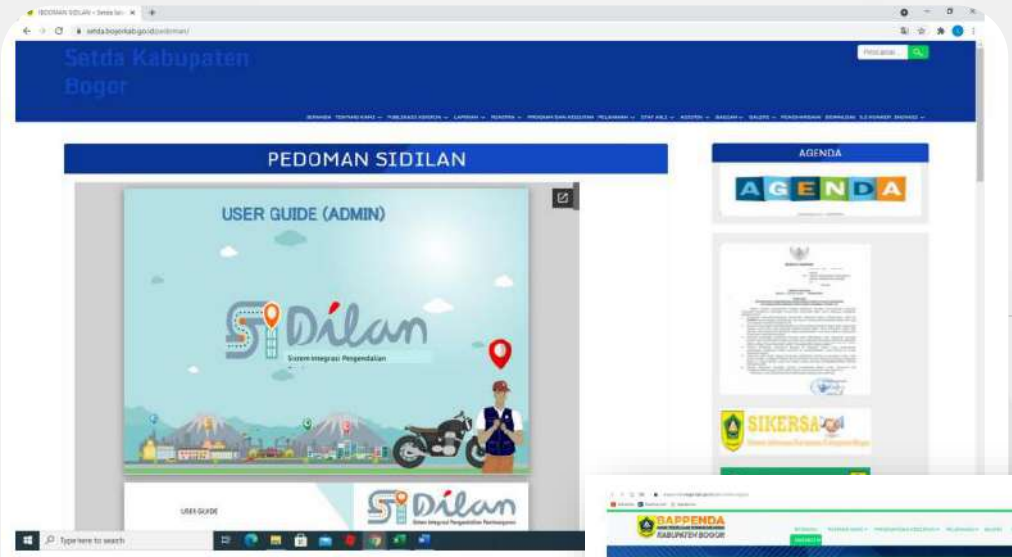
Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia:

- **Terdapat pedoman teknis inovasi daerah yang dapat diakses secara online (nilai: 3)**
- **Tidak terdapat pedoman teknis inovasi daerah yang dapat diakses secara online (nilai: 0)**

BOBOT 1

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png



https://setda.bogorkab.go.id/pedoman/



https://bappenda.bogorkab.go.id/pbb-online-esppt/

https://bappenda.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Panduan-Inovasi-PBB-ONLINE-ESPPT.pdf

12. KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN

Kemudahan mendapatkan informasi layanan

Pilih jenis media informasi layanan yang tersedia:

- **Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode (nilai: 3)**
- **Informasi layanan diperoleh melalui kurang dari 3 metode (nilai: 0)**

BOBOT 1

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan Nomor layanan telp/ screenshot email/akun media sosial/nama aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)





13. KEMUDAHAN PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.

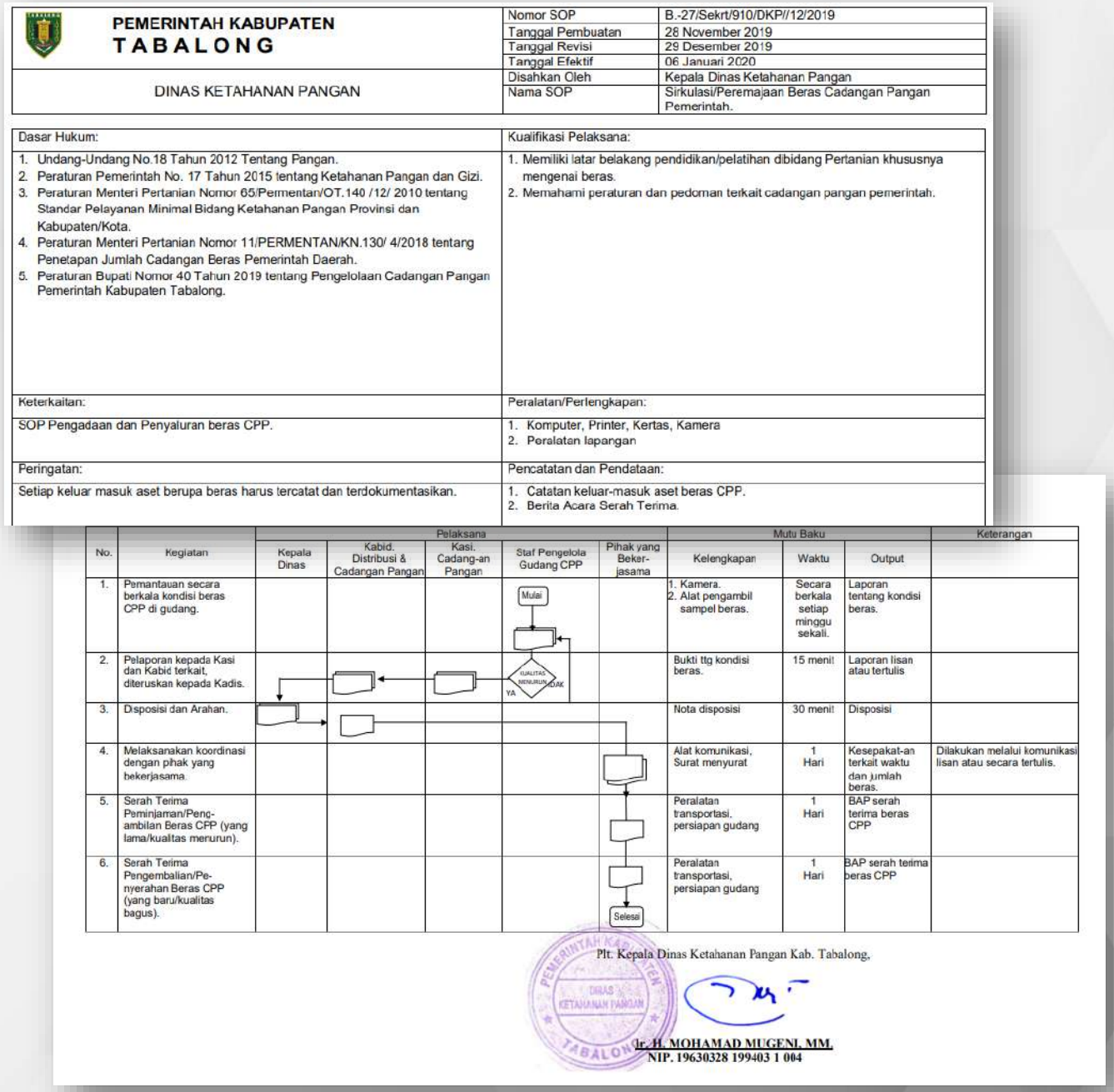
Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi:

- **Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari (nilai: 6)**
- **Hasil inovasi diperoleh dalam waktu lebih dari 1 hari (nilai: 0)**

KETERANGAN:

- SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu dan prosedur layanan yang dikeluarkan pada tahun terakhir/dokumen masih berlaku (pdf)

BOBOT 2



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KETAHANAN PANGAN

Nomor SOP	B.-27/Sekrt/910/DKP//12/2019
Tanggal Pembuatan	28 November 2019
Tanggal Revisi	29 Desember 2019
Tanggal Efektif	06 Januari 2020
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Nama SOP	Sirkulasi/Peremajaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah.

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140 /12/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/ 4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong.	1. Memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan dibidang Pertanian khususnya mengenai beras. 2. Memahami peraturan dan pedoman terkait cadangan pangan pemerintah.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pengadaan dan Penyaluran beras CPP.	1. Komputer, Printer, Kertas, Kamera 2. Peralatan lapangan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Setiap keluar masuk aset berupa beras harus tercatat dan terdokumentasikan.	1. Catatan keluar-masuk aset beras CPP. 2. Berita Acara Serah Terima.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kabid. Distribusi & Cadangan Pangan	Kasi. Cadang-an Pangan	Staf Pengelola Gudang CPP	Pihak yang Beker-jasama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemantauan secara berkala kondisi beras CPP di gudang.				Mulai		1. Kamera. 2. Alat pengambil sampel beras.	Secara berkala setiap minggu sekali.	Laporan tentang kondisi beras.	
2.	Pelaporan kepada Kasi dan Kabid terkait, diteruskan kepada Kadis.				KUALITAS MENURUN? YA / TIDAK		Bukti ttg kondisi beras.	15 menit	Laporan lisan atau tertulis	
3.	Disposisi dan Arahan.						Nota disposisi	30 menit	Disposisi	
4.	Melaksanakan koordinasi dengan pihak yang bekerjasama.						Alat komunikasi, Surat menyurat	1 Hari	Kesepakat-an terkait waktu dan jumlah beras.	Dilakukan melalui komunikasi lisan atau secara tertulis.
5.	Serah Terima Peminjaman/Peng-ambilan Beras CPP (yang lama/kualitas menurun).						Peralatan transportasi, persiapan gudang	1 Hari	BAP serah terima beras CPP	
6.	Serah Terima Pengembalian/Pe-nyerahan Beras CPP (yang baru/kualitas bagus).					Selesai	Peralatan transportasi, persiapan gudang	1 Hari	BAP serah terima beras CPP	

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabalong,

Ir. H. MOHAMAD MUGENI, MM.
NIP. 19630328 199403 1 004

14. PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN

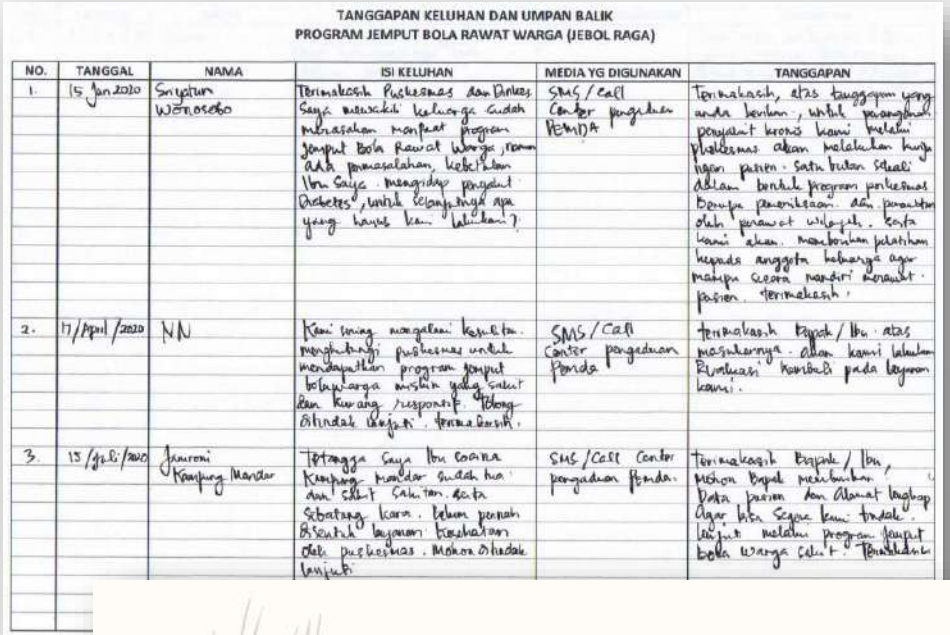
Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.

Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

- **≥ 91% (nilai: 3)**
- **Kurang dari < 91% (nilai: 0)**

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan



TANGGAPAN KELUHAN DAN UMPAN BALIK
PROGRAM JEMPUT BOLA RAWAT WARGA (JEBOL RAGA)

NO.	TANGGAL	NAMA	ISI KELUHAN	MEDIA YG DIGUNAKAN	TANGGAPAN
1.	15 Jan 2020	Sriyatun Wonosobo	Terimakasih Puskesmas dan Dinkes Saya mewakili keluarga sudah merasakan manfaat program Jemput Bola Rawat Warga, rumah ada permasalahan, kebetulan Ibu Saiyo mengidap pengidap Diabetes, untuk selanjutnya apa yang harus kami lakukan?	SMS / Call Center pengaduan PEMDA	Terimakasih, atas tanggapan yang anda berikan, untuk penanganan pengidap kronis kami melalui Puskesmas akan melakukan kunjungan pasien. Satu bulan sekali dalam bentuk program perkesmas berupa pemeriksaan dan perawatan oleh perawat wilayah. Serta kami akan memberikan pelatihan kepada anggota keluarga agar mampu secara mandiri merawat pasien. Terimakasih.
2.	17/April/2020	NN	Kami sering mengalami kendala menghubungi puskesmas untuk mendapatkan program jemput bola warga miskin yang sakit dan kurang responsif. Blong ditindak lanjuti. Terimakasih.	SMS / Call Center pengaduan Pemda	Terimakasih Bapak / Ibu atas masukannya. akan kami lakukan Evaluasi kembali pada layanan kami.
3.	13/Juli/2020	Jamroni Kampung Mandar	Tetangga Saya Ibu Coana Kampung mandar sudah ha dan sakit Saluran kata sebatang kara. Lebam pernah disentuh layanan kesehatan oleh puskesmas. Mohon ditindak lanjuti	SMS / Call Center pengaduan pemda.	Terimakasih Bapak / Ibu, mohon Bapak memberikan Data pasien dan Alamat lengkap Agar bisa segera kami tindak lanjuti melalui program jemput bola warga sakit. Terimakasih

RASIO PENGADUAN JEMPUT BOLA RAWAT WARGA TAHUN 2020

TOTAL PENGADUAN : 4 PENGADUAN
PENGADUAN DITANGANI : 4 PENGADUAN
RASIO PENGADUAN : 4/4 X 100 % = 100 PERSEN

BOBOT 1

15. LAYANAN TERINTEGRASI

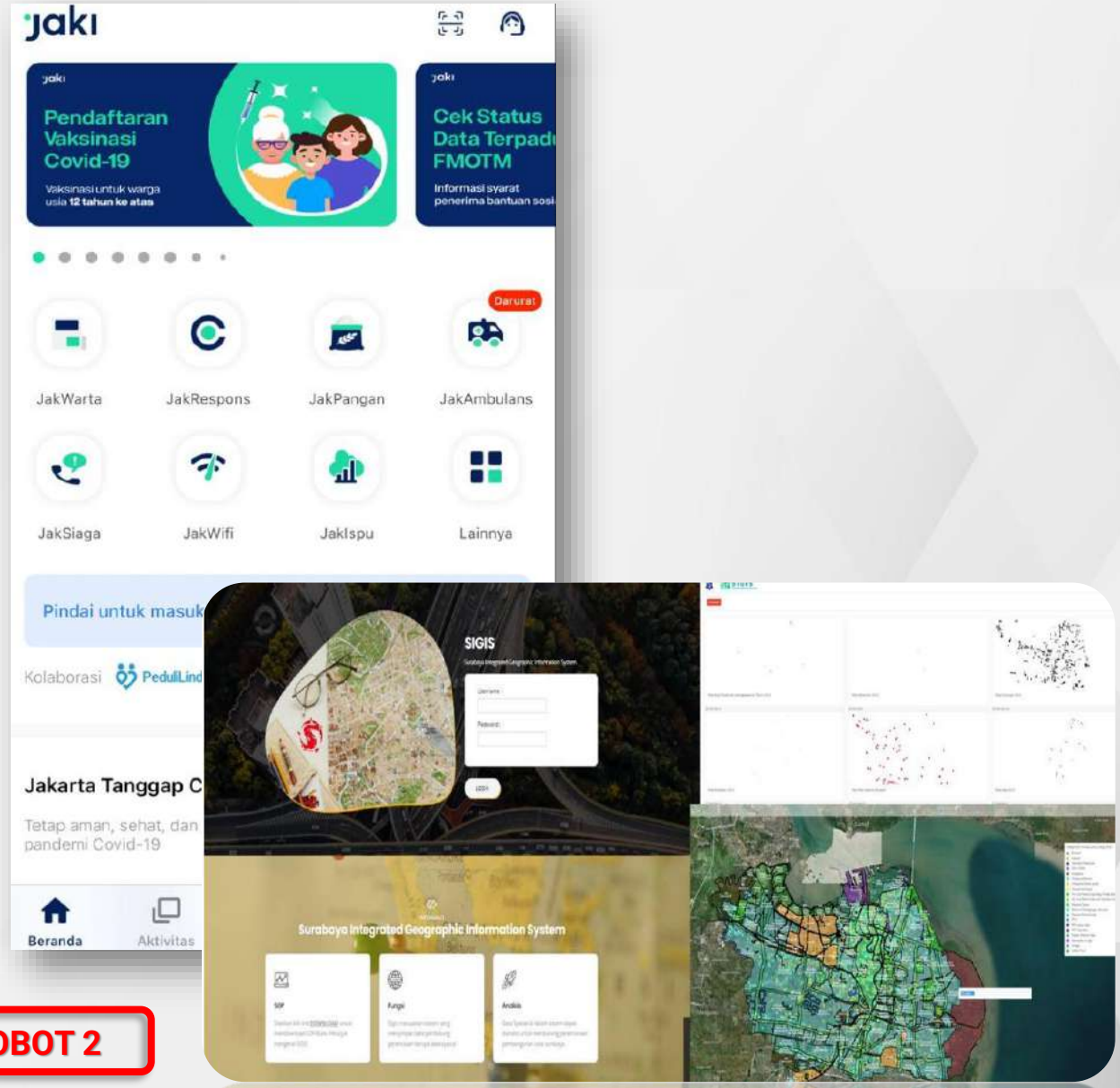
Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.

DIGITAL

- **Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi (nilai: 6)**
- **Tidak ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi (nilai: 0)**

NON DIGITAL

- **Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan (nilai: 6)**
- **Layanan tidak terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan (nilai: 0)**



BOBOT 2

KETERANGAN:

- Screenshot aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda/ halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png)

16. REPLIKASI

Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain

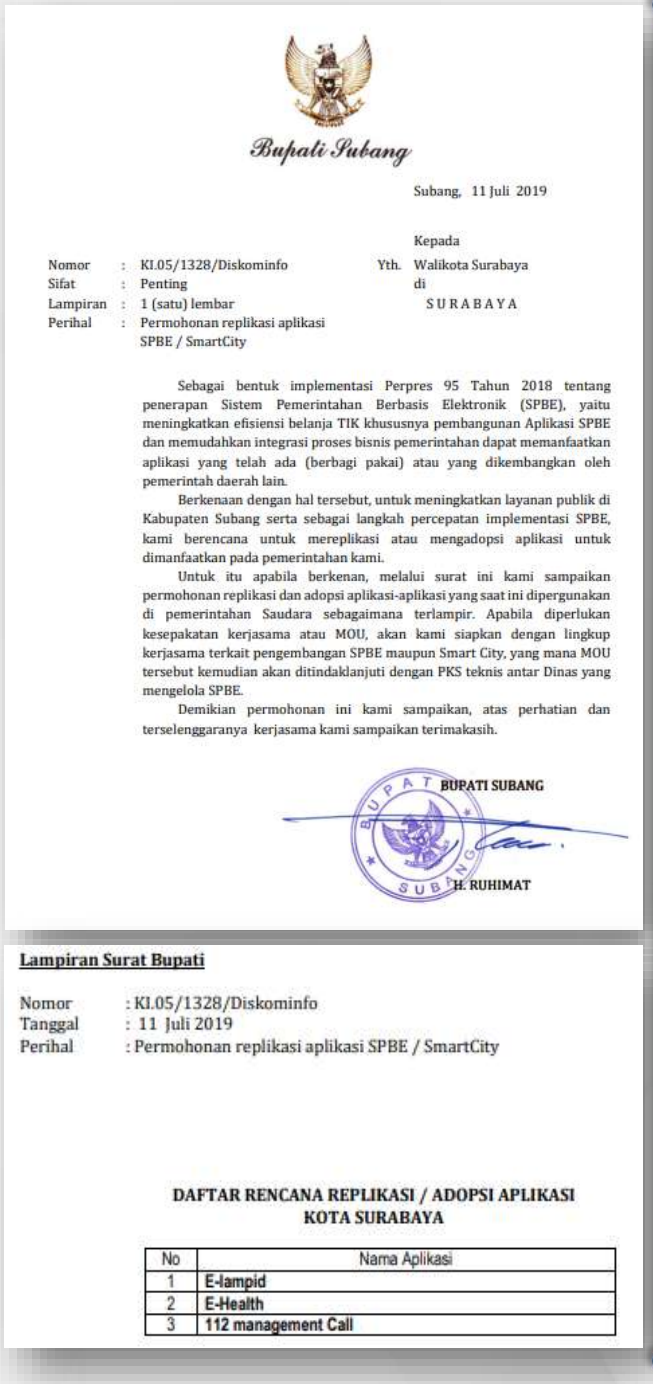
(Optional/Tidak Wajib)

Tidak dinilai dalam Skor Kematangan Inovasi

KETERANGAN:

- Dokumen PKS/MoU/dokumen korespondensi replikasi/surat pernyataan/surat keterangan (pdf)

BOBOT 3



Bupati Subang

Subang, 11 Juli 2019

Kepada

Nomor : KI.05/1328/Diskominfo
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan replikasi aplikasi SPBE / SmartCity

Yth. Walikota Surabaya
di
SURABAYA

Sebagai bentuk implementasi Perpres 95 Tahun 2018 tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan dapat memanfaatkan aplikasi yang telah ada (berbagi pakai) atau yang dikembangkan oleh pemerintah daerah lain.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan layanan publik di Kabupaten Subang serta sebagai langkah percepatan implementasi SPBE, kami berencana untuk mereplikasi atau mengadopsi aplikasi untuk dimanfaatkan pada pemerintahan kami.

Untuk itu apabila berkenan, melalui surat ini kami sampaikan permohonan replikasi dan adopsi aplikasi-aplikasi yang saat ini dipergunakan di pemerintahan Saudara sebagaimana terlampir. Apabila diperlukan kesepakatan kerjasama atau MOU, akan kami siapkan dengan lingkup kerjasama terkait pengembangan SPBE maupun Smart City, yang mana MOU tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dengan PKS teknis antar Dinas yang mengelola SPBE.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terselenggaranya kerjasama kami sampaikan terimakasih.

BUPATI SUBANG

H. RUHIMAT

Lampiran Surat Bupati

Nomor : KI.05/1328/Diskominfo
Tanggal : 11 Juli 2019
Perihal : Permohonan replikasi aplikasi SPBE / SmartCity

DAFTAR RENCANA REPLIKASI / ADOPSI APLIKASI KOTA SURABAYA

No	Nama Aplikasi
1	E-lampid
2	E-Health
3	112 management Call



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 510.12/8/35.73.111/2020
Nomor : 134.4/171/PKS/429.012/2020

TENTANG

TRANSFER SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN *SMART CITY*

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (6-3-2020), bertempat di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. H. MUJIONO, M.Si** : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/249/429.204/2019 Tanggal



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 073/4291/KSM
NOMOR : 134.4/544/KSB/429.012/2019

TENTANG

PENGEMBANGAN *E-COVERNMENT*

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-7-2019), bertempat di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. CELLICA NURRACHADIANA : Bupati Karawang, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang yang

17. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI*

Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.

Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah:

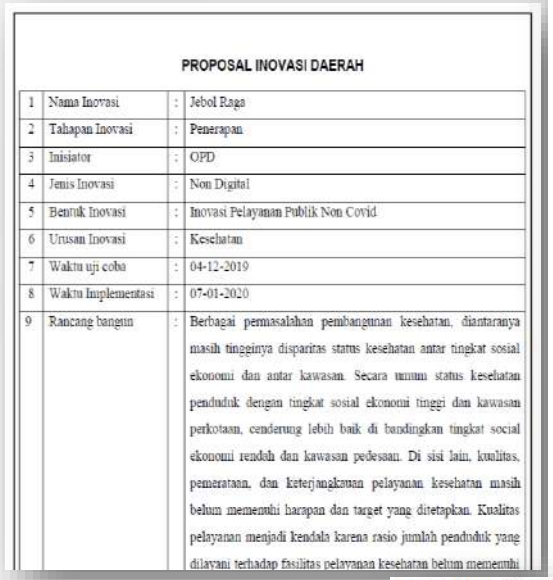
- **Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan (nilai: 6)**
- **Inovasi dapat diciptakan dalam waktu lebih dari 4 bulan (nilai: 0)**

BOBOT 2

KETERANGAN:

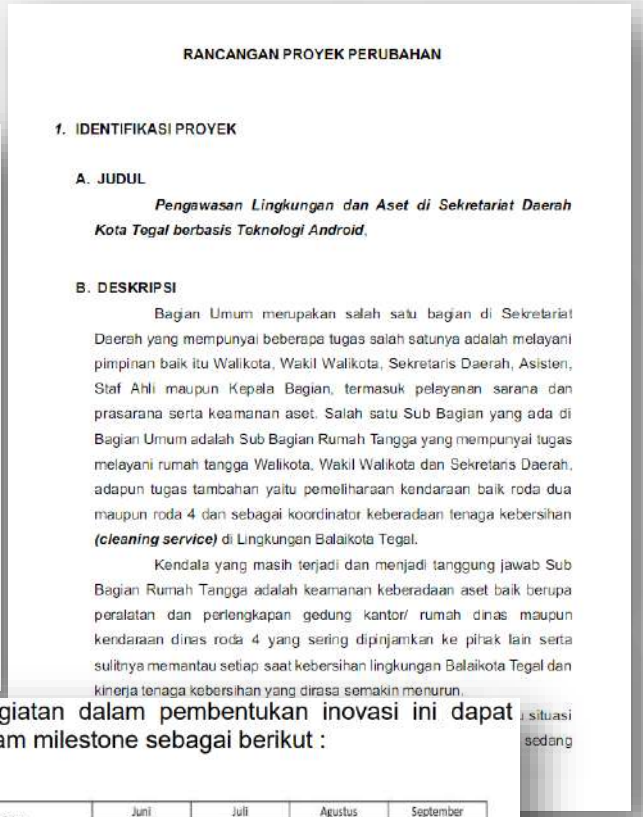
- Dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf).

Tampilkan rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah



PROPOSAL INOVASI DAERAH

1	Nama Inovasi	:	Jebol Raga
2	Tahapan Inovasi	:	Penerapan
3	Inisiator	:	OPD
4	Jenis Inovasi	:	Non Digital
5	Bentuk Inovasi	:	Inovasi Pelayanan Publik Non Covid
6	Urusan Inovasi	:	Kesehatan
7	Waktu uji coba	:	04-12-2019
8	Waktu Implementasi	:	07-01-2020
9	Rancang bangun	:	Berbagai permasalahan pembangunan kesehatan, diantaranya masih tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi dan antar kawasan. Secara umum status kesehatan penduduk dengan tingkat sosial ekonomi tinggi dan kawasan perkotaan, cenderung lebih baik di bandingkan tingkat social ekonomi rendah dan kawasan pedesaan. Di sisi lain, kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih belum memenuhi harapan dan target yang ditetapkan. Kualitas pelayanan menjadi kendala karena rasio jumlah penduduk yang dilayani terhadap fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi



RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

1. IDENTIFIKASI PROYEK

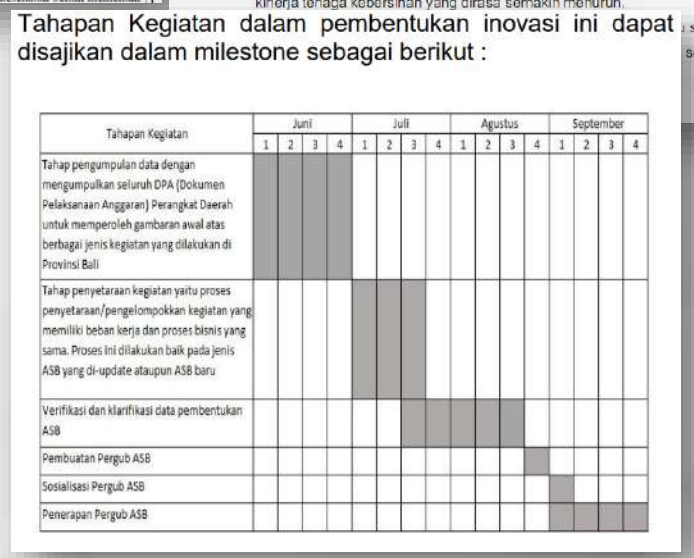
A. JUDUL

Pengawasan Lingkungan dan Aset di Sekretariat Daerah Kota Tegal berbasis Teknologi Android.

B. DESKRIPSI

Bagian Umum merupakan salah satu bagian di Sekretariat Daerah yang mempunyai beberapa tugas salah satunya adalah melayani pimpinan baik itu Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli maupun Kepala Bagian, termasuk pelayanan sarana dan prasarana serta keamanan aset. Salah satu Sub Bagian yang ada di Bagian Umum adalah Sub Bagian Rumah Tangga yang mempunyai tugas melayani rumah tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, adapun tugas tambahan yaitu pemeliharaan kendaraan baik roda dua maupun roda 4 dan sebagai koordinator keberadaan tenaga kebersihan *(cleaning service)* di Lingkungan Balaikota Tegal.

Kendala yang masih terjadi dan menjadi tanggung jawab Sub Bagian Rumah Tangga adalah keamanan keberadaan aset baik berupa peralatan dan perlengkapan gedung kantor/ rumah dinas maupun kendaraan dinas roda 4 yang sering dipinjamkan ke pihak lain serta sulitnya memantau setiap saat kebersihan lingkungan Balaikota Tegal dan kinerja tenaga kebersihan yang dirasa semakin menurun.



Tahapan Kegiatan dalam pembentukan inovasi ini dapat disajikan dalam milestone sebagai berikut :

Tahapan Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap pengumpulan data dengan mengumpulkan seluruh DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perangkat Daerah untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang dilakukan di Provinsi Bali																
Tahap penyetaraan kegiatan yaitu proses penyetaraan/pengelompokkan kegiatan yang memiliki beban kerja dan proses bisnis yang sama. Proses ini dilakukan baik pada jenis ASB yang di-update ataupun ASB baru																
Verifikasi dan klarifikasi data pembentukan ASB																
Pembuatan Pergub ASB																
Sosialisasi Pergub ASB																
Penerapan Pergub ASB																

18. KEMANFAATAN INOVASI*

DIBUKTIKAN DENGAN (PILIH SALAH SATU SATUAN YANG PALING BISA DIPENUHI)	PILIH RENTANG JUMLAH PENGGUNA/ PENERIMA MANFAAT INOVASI DAERAH
Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/ penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) (jpg/jpeg/png)	**Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)** ▪ Jumlah pengguna atau penerima manfaat 501 orang keatas (nilai: 9) ▪ Jumlah pengguna atau penerima manfaat kurang dari 500 (nilai: 0)
Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/ rw/kampung/KK/ organisasi, dsb) Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi (pdf)	**Satuan unit (opd/uptd/ desa/rt/rw/ kampung/ KK/organisasi, dsb)** ▪ Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran (nilai: 9) ▪ Cakupan unit penerima manfaat ≤ 50,00% total dari unit sasaran (nilai: 0)
Satuan biaya (rupiah) Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (pdf)	**Satuan biaya (rupiah)** ▪ Efisiensi belanja sebesar > 20,00% (nilai: 9) ▪ Efisiensi belanja sebesar ≤ 20,00% (nilai: 0)
Satuan pendapatan (rupiah) Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb) (pdf)	**Satuan pendapatan (rupiah)** ▪ Penambahan pendapatan bagi pemda atau OPD atau unit kerja yang menerapkan inovasi ≥20% (nilai: 9) ▪ Penambahan pendapatan bagi pemda atau OPD atau unit kerja yang menerapkan inovasi < 20,00% (nilai: 0)
Satuan hasil produk/satuan penjualan Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan (pdf)	**Satuan hasil produk/ satuan penjualan** ▪ Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang (nilai: 9) ▪ Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan ≤ 200 barang (nilai: 0)
Satuan Dampak Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	**Dampak** ▪ Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 3 (tiga) periode waktu pengukuran (nilai: 9) ▪ Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif kurang dari 3 (tiga) periode waktu pengukuran (nilai: 0)

BOBOT 3

19. MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH

Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah

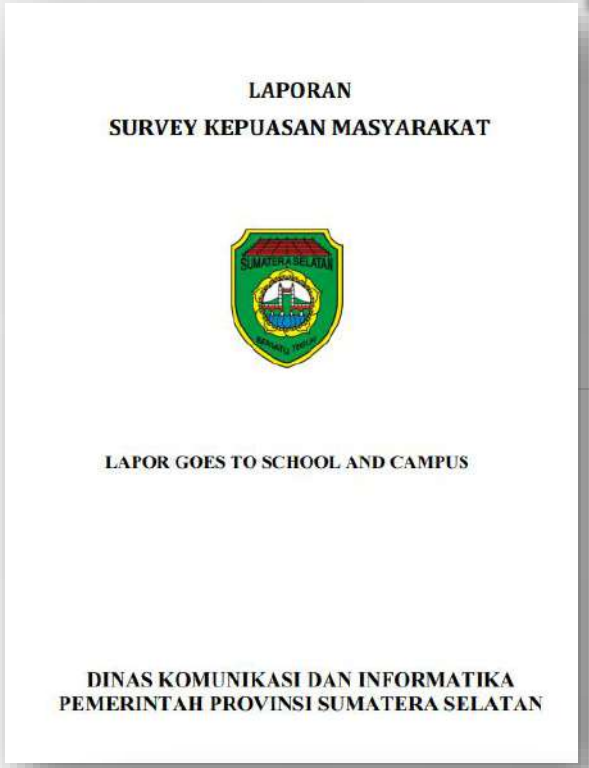
Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan:

- **Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis (nilai: 6)**
- **Tidak ada hasil monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis (nilai: 0)**

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)

BOBOT 2



LAPORAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

LAPOR GOES TO SCHOOL AND CAMPUS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2021

JENIS LAYANAN : JESSICA MARON
UNIT PELAYANAN : KEMANTREN MANTRIJERON
ALAMAT : Jl. DI Panjaitan No. 84, Yogyakarta 55141
TELEPON/FAX : (0274) 375793

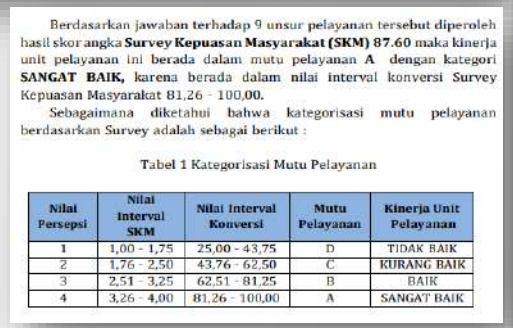
NO	UNSUR PELAYANAN *)	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,381
2	Kesesuaian Prosedur pelayanan	3,310
3	Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan	3,238
4	Kenyamanan Tempat Pelayanan	3,381
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,476
6	Kompetensi Pelaksana Layanan	3,476
7	Perilaku Petugas Pelaksana Pelayanan	3,548
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,429
9	Ketepatan waktu pelayanan	3,476

IKM Unit Pelayanan	:	84,46
Mutu Pelayanan	:	B
Kinerja Unit Pelayanan	:	Baik

Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan
Unsur Pelayanan yang perlu ditingkatkan **) :
1. Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan unsur yang kategorinya Tidak Baik/Kurang Baik :
1. Melakukan optimalisasi personil

Yogyakarta, Juli 2021
Mantri Pasang Praja Mantrijer
AFRITA SUHARNO, S.Sos
NIP. 19670419199803100



Berdasarkan jawaban terhadap 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor angka **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 87.60** maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT BAIK,** karena berada dalam nilai interval konversi Survey Kepuasan Masyarakat 81,26 - 100,00.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Survey adalah sebagai berikut :

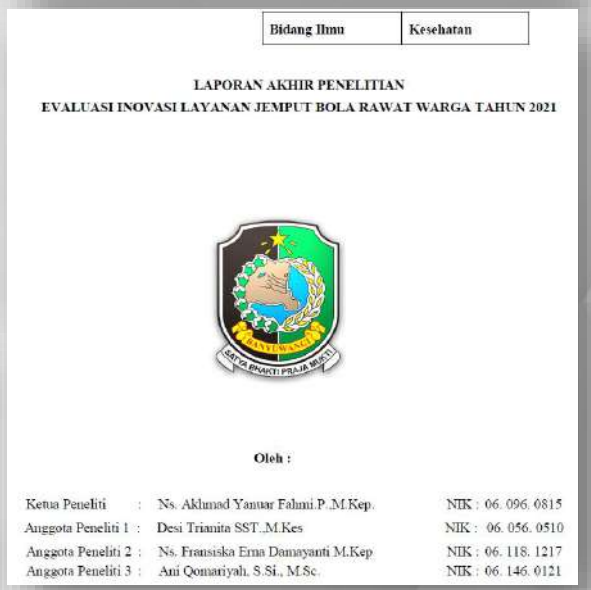
Tabel 1 Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	TIDAK BAIK
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK



Tabel 2
Nilai Rata-rata (NRR) dan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.513
U2	Prosedur	3.487
U3	Waktu Pelayanan	3.373
U4	Biaya/Tarif	4.000
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.387
U6	Kompetensi Pelayanan	3.480
U7	Perilaku Pelayanan	3.467
U8	Penanganan Pengaduan	3.427
U9	Sarana dan Prasarana Layanan	3.720



Bidang Ilmu	Kesehatan

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
EVALUASI INOVASI LAYANAN JEMPUT BOLA RAWAT WARGA TAHUN 2021

Oleh :

Ketua Peneliti	Ns. Aklimad Yanuar Fahmi.P.,M.Kep.	NIK : 06. 096. 0815
Anggota Peneliti 1	Desi Trianita SST.,M.Kes	NIK : 06. 056. 0510
Anggota Peneliti 2	Ns. Fransiska Erna Damayanti M.Kep	NIK : 06. 118. 1217
Anggota Peneliti 3	Ani Qomariyah, S.Si., M.Sc.	NIK : 06. 146. 0121

20. KUALITAS INOVASI DAERAH*

Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah

Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video:

- **Memenuhi 5 unsur substansi (nilai: 12)**
- **Memenuhi kurang dari 5 unsur substansi (nilai: 0)**



Unsur Video Inovasi Daerah meliputi:

1. Latar Belakang Inovasi;
2. Penjaringan Ide Inovasi;
3. Pemilihan Ide;
4. Manfaat;dan
5. Dampak

BOBOT 4

TERIMA KASIH